

MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI TIONGKOK KE SUDAN

PASCA MERDEKA (2011-2014)

(Skripsi)

Oleh

Putri Dumora Nasution



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan Pasca merdeka 2011-2014

Oleh:

Putri Dumora Nasution

Penelitian mencoba menjelaskan mengenai pelaksanaan dan motif bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan tahun 2011-2014. Penelitian ini menggunakan dua landasan konseptual yaitu bantuan luar negeri dan motif bantuan luar negeri. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumentasi yaitu dari laman resmi dan juga laporan resmi dari Tiongkok, Sudan, dan Sudan Selatan. Penulis menggunakan tiga teknik analisis data yaitu reduksi data dengan mengelompokkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, penyajian data dengan menampilkan data menggunakan tabel ataupun grafik yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan setelah membaca dari data-data yang telah didapatkan dan juga menggunakan data untuk memperkuat argumen. Untuk menganalisis motif, peneliti membagi bantuan Tiongkok menjadi tiga jenis yaitu pinjaman, hibah dan kerjasama teknis. Hasil dari penelitian studi pustaka ini adalah bantuan luar negeri yang diberikan Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan memiliki motif ekonomi. Hadirnya motif ekonomi dapat dilihat dari alokasi bantuan yang diberikan Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur khususnya pengembangan produksi minyak.

Kata Kunci : Bantuan Luar Negeri, Motif bantuan, Tiongkok, Sudan dan Sudan Selatan

ABSTRAK

The Motive of Chinese Foreign Assistance to Post-Independence Sudan 2011-2014

By

Putri Dumora Nasution

This research tries to explain regarding the implementation and motives of Chinese foreign aid to Sudan and South Sudan in 2011-2014. The type of research used is descriptive qualitative and data collection techniques, literature studies and documentation studies from official pages as well as official reports from China, Sudan and South Sudan. The author uses three data analysis techniques, namely data reduction by grouping the data needed in research, data display by displaying data using tables or graphs and conclusion after reading from the data that has been obtained and also using data to strengthen arguments., . To analyze motives, researchers divided Chinese aid into three types, namely loans, grants and technical cooperation. The results of this literature study are that foreign aid provided by China to Sudan and South Sudan has economic motives. The presence of economic motives can be given from the assistance given to Sudan and South Sudan which are mostly allocated for infrastructure development specifically for the development of oil production.

Keyword : aid motives, China, foreign aid, Sudan and South Sudan

**MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI TIONGKOK KE SUDAN
PASCA MERDEKA (2011-2014)**

Oleh

PUTRI DUMORA NASUTION

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI TIONGKOK
KE SUDAN PASCA MERDEKA (2011-2014)**

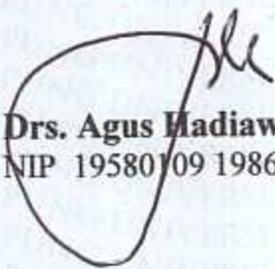
Nama Mahasiswa : **Putri Dumora Nasution**

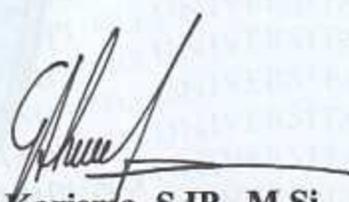
No. Pokok Mahasiswa : **1416071064**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

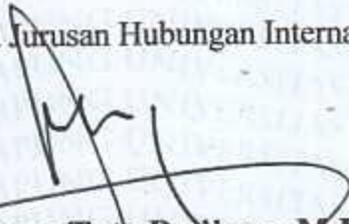
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002


Gita Karisma, S.IP., M.Si.
NIP 19870128 201404 2 001

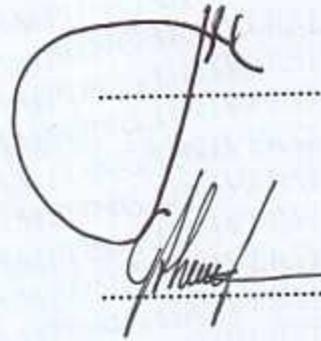
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1.006

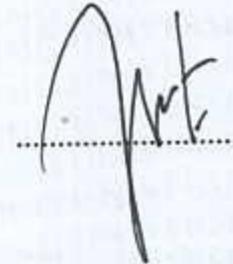
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



Sekretaris : **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**



Penguji
Bukan Pembimbing: **Prof. Dr. Yulianto, M.S.**



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **08 Januari 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 04 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,



Putri Dumora Nasution
NPM 1416071064

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Putri Dumora Nasution. Lahir di Kartaraharja pada tanggal 24 Desember 1996 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak M. Salman Nasution dan Alm. Ibu Roihana Dalimunte.

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Miftahul Jannah Kartaraharja, kemudian ke jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 03 Kartaraharja 2002 dan lulus di tahun 2008. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Tulang Bawang Udik pada tahun 2008 dan lulus di tahun 2011. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tumijajar pada tahun 2011 dan lulus di tahun 2014.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur masuk SNMPTN dan aktif dalam komunitas tari Corpous Motum sejak tahun 2014 dan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai acara.

MOTTO

**Dimanapun kamu berada, kamu tidak bisa menyamakan semua
pemikiran orang.
(Gita Karisma, 2018)**

**Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus
(Putri Dumora Nasution, 2018)**

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan karya sederhana ini untuk

Kedua orang tuaku tercinta,
Bapak M. Salman Nasution dan Alm. Ibu Roihana Dalimunte
saudaraku tercinta Alvi Ansyori Nasution dan Reza Amanda Nasution
sebagai tanda bakti dan cinta kasihku,

serta Almamater tercinta
Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan Pasca Merdeka (2011-2014)”** ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu hubungan internasional.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi , kritik dan saran, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku pembimbing utama yang sangat sabar dalam membimbing penulis, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si , selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah berperan sebagai pembimbing yang sangat sabar, sebagai bunda dan sebagai kakak.
5. Bapak Prof. Yulianto, M.S , selaku Dosen Pembahas/ Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si , selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu menjadi tempat untuk konsultasi, berbagi cerita. Terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menjadi hebat.
7. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan staf Mba Ata atas dukungan pembelajaran selama menempuh perkuliahan, serta membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan
8. Bapak M. Salaman Nasution sebagai Ayah yang selalu memberikan contoh yang baik dan memberikan semangat hingga dumora bisa mencapai tahap ini. Terimakasih telah menemani dumora dalam keadaan apapun. Terimakasih untuk tetap sehat dan memberikan nasihat yang berguna bagi dumora terutama dalam pendidikan. Semoga dengan menyelesaikan pendidikan ini dapat memberikan sedikit kebahagiaan di hati Ayah dan dapat mengangkat sedikit derajat keluarga kita untuk hal yang positif agar kita menjadi orang yang lebih di hormati. Satu keinginan Ayah Sudah Dumora penuh untuk mendapatkan gelar sarjana. Semoga memori ini tetap terekam di ingatan Ayah. Dumora Selalu berdoa kepada Allah SWT untuk selalu diberikan kesempatan memberikan kebahagiaan lain kepada Ayah.
9. Alm Ibu Roihana Dalimunte, tidak ada kata lain selain terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu. Terimakasih untuk tetap mendo'akan dumora meskipun kita sudah tidak bersama. Terimakasih telah menanamkan ke mandirian ibu kepada dumora selama delapan tahun ini.

Berkat do'a dan Ridho dari ibu dumora sudah mencapai tahap ini untuk mendapatkan gelar sarjana. Dumora berharap ibu selalau diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

10. Alvi Ansyori dan Reza Amanda sebagai abang yang telah memberikan semangat yang sangat luar biasa untuk adiknya. Terimakasih telah bekerja keras untuk memberikan kebahagiaan hingga dukungan materi kepada dumora. Terimakasih atas dukungan dan do'a yang diberikan meskipun kita tidak bertemu hampir empat tahun. Terimakasih untuk tetap memberikan senyuman meskipun sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dumora sudah mencapai tahap ini untuk mendapatkan gelar sarjana sebagaimana yang di inginkan oleh abang alvi dan abang manda. Mari tetap bersama untuk saling memberi kebahagiaan dan saling menguatkan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan rezeki yang baik untuk abang alvi dan bang manda.
11. Ibu Amlawati Nasution sebagai bibi sekaligus berperan sabagai ibu hampir delapan tahun ini. Terimakasih atas dukungan, do'a dan materi yang telah diberikan selama ini hingga dumora bisa mendapatkan gelar sarjana. Dumora tidak akan pernah lupa atas nasihat yang diberikan. Dumora sangat menyayangi ibu dalam keadaan apapun. Semoga dengan tercapainya dumora hingga tahap ini dapat memberikan sedikit kebahagiaan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada ibu.
12. Teman yang kuanggap saudara yang selalu menemani dalam suka dan duka, serta proses belajar di lingkungan kampus Yuni Ardiani, Eka Supriyati, Biyes Nurul A, Endani Agustina, Binanda Firsty A, Rita Widiyanti dan Rima Silviana A. Terima kasih atas semangat yang kalian berikan dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan juga kenangan yang sangat berharga yang kalian berikan. Semoga kalian tetap bahagia, mencapai keinginan kalian dan yang terpenting semoga kita tetap menjalin silaturahmi yang baik hingga akhir nanti.
13. Penyemangat dan pengingat dalam pengerjaan skripsi Hali David Anggoro. Terimakasih atas waktu dan mau bersedia sebagai pengingat dalam pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendoakan, dan menemani

berproses dalam mencapai target. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mencapai keinginan selanjutnya.

14. Teman teman yang saya sayangi Kak Meka, Amel, hediati, puspa, tia, hani, oni, azka, eris, 14 angora **Corpous Motum**, dan mahasiswa penunggu lorong yang tidak dapat disebut satu persatu terimakasih kalian telah menyemangati dan pernah menjadi bagian dari proses penyelesaian skripsi. Seringnya kita menggu hingga berjam-jam semoga dapat melatih kesabaran kita. Terimakasih atas dukungan kalian semoga kita dimudahkan untuk tahapan kehidupan selanjutnya. Semoga nantinya kita dapat bertemu dalam 'Reuni Akbar Penunggu Lorong'.
15. Healing dalam penyelesaian skripsi **Taehyung BTS dan B.I IKON** yang musiknya selalu menemani dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
16. Seluruh teman-teman Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2014, semoga kita semua bisa menggapai mimpi kita masing-masing dan sukses dengan jalannya masing-masing.
17. Semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam bentuk apapun.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang membantu dalam proses yang dijalani oleh penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 07 Januari 2019

Penulis,

Putri Dumora Nasution

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Penelitian.....	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1.Literatur Jurnal	9
2.2.Landasan Konseptual	14
2.2.1 Bantuan Luar Negeri	14
2.2.2 Motif Bantuan Luar Negeri.....	17
2.3.Kerangka Pemikiran.....	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	24
3.2. Fokus Penelitian.....	25
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	26
3.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5. Teknik Analisis Data.....	27
IV. GAMBARAN UMUM	30
4.1 Perkembangan Ekonomi Tiongkok.....	32
4.2 Kebijakan Bantuan Luar Negeri Tiongkok.....	35
4.3 Gambaran Umum Sudan.....	45
4.3.1 Sudan Utara.....	47
4.3.2 Sudan Selatan.....	50
4.4 Hubungan Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan 1950-2010	52

V. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
5.1 Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan Selatan 2011-2014	57
5.1.1 Bantuan Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan dalam Bentuk Pinjaman	59
5.1.2 Bantuan Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan dalam Bentuk Hibah.....	63
5.1.3 Bantuan Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan dalam Bentuk Kerjasama Teknis	66
5.2 Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan 2011-2014.....	70
VI. PENUTUP.....	94
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

CPA	: <i>Comprehensive Peace Agreement</i>
CNPC	: <i>China National Petroleum Company</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GOS	: <i>Government of Sudan</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: <i>Product Domestic Bruto</i>
PKC	: Partai Komunis China
UNDP	: <i>United Development Programme</i>
UNESCO	: <i>United Nation Education, Scientific and Cultural Organization</i>
US	: <i>United State</i>
SPLM	: <i>Sudan People Liberty Movement</i>
WFP	: <i>World Food Program</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Distribusi Bantuan Luar Negeri Tiongkok	3
2. Kerangka Pemikiran.....	22
3. GDP Tiongkok Tahun 1998-2016.....	33
4. Distribusi Bantuan Tiongkok Akhir 2009.....	40
5. Distribusi Pinjaman Tiongkok	43
6. Wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan.....	46
7. Produk Domestik Bruto Sudan	47
8. Alokasi Bantuan Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan 2011-2014... 68	
9. Ekspor Produk Makanan Tiongkok ke Sudan Selatan.....	86
10. Presentase Total Bantuan Tiongkok	91
11. Ekspor Minyak Sudan dan Sudan Selatan 2011	93
12. Ekspor minyak Sudan dan Sudan Selatan 2011-2014	94
13. GDP Sudan dan Sudan Selatan 2011-2014.....	95
14. Impor Minyak Tiongkok dari Sudan dan Sudan Selatan 2011-2014.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Fokus Bantuan Luar Negeri Tiongkok.....	41
2. Distribusi Bantuan Pinjaman dan Hibah Tiongkok ke Sudan.....	53
3. Jumlah Total Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan 1950-2005	54
4. Jumlah Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan 2011 2014	57
5. Dana Pinjaman Tiongkok ke Sudan Selatan 2011-2014.....	58
6. Dana Pinjaman Tiongkok ke Sudan 2011-2014	60
7. Dana Hibah Tiongkok ke Sudan Selatan 2011-2014	62
8. Dana Hibah Tiongkok ke Sudan 2011-2014.....	64
9. Bantuan Kerjasama Teknis Tiongkok ke Sudan Selatan 2011-2014.....	66
10. Bantuan Kerjasama Teknis Tiongkok ke Sudan 2011-2014.....	67
11. Alokasi Bantuan Kemanusiaan Tiongkok ke Sudan Selatan 2011-2014.....	71
12. Alokasi Bantuan Kemanusiaan Tiongkok ke Sudan 2011-2014.....	76
13. Alokasi Bantuan Pinjaman Tiongkok ke Sudan 2011-2014	77
14. Bantuan Pengembangan Minyak Ke Sudan dan Sudan Selatan 2011-2014...	91

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena bantuan luar negeri mulai muncul sebelum perang dunia kedua. Terdapat sebuah norma yang tak tertulis bahwa negara kaya bertanggung jawab untuk membantu negara miskin dan negara yang terbelit krisis (Lancaster, 2007: 25). Bantuan luar negeri semakin berkembang terutama di masa Perang Dingin. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menggunakan bantuan luar negeri untuk mendapatkan banyak sekutu dan menyebarkan ideologi ke negara lain. Namun seiring perkembangan, bantuan luar negeri tersebut mengalami pergeseran perspektif yang menekankan pada karakteristik arah, aktor, motif dan tujuan bantuan luar negeri negara pendonor. Fenomena ini terus berlanjut sampai sekarang karena suatu negara membutuhkan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Bantuan luar negeri merupakan salah satu strategi negara yang digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang maupun dana (Yani, 2011: 81). Selain itu bantuan luar negeri juga didefinisikan sebagai transfer modal, barang atau layanan dari suatu negara atau organisasi internasional untuk kepentingan negara penerima. Bantuan luar

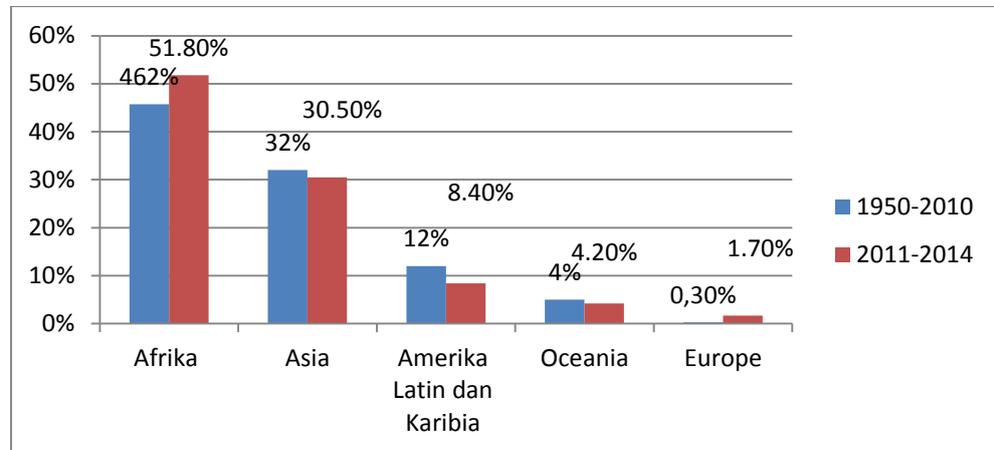
negeri yang diberikan kepada negara lain tidak lain hanya untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Morgentau, 1962: 304).

Ada beberapa jenis bantuan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan, bantuan militer dan bantuan untuk pembangunan ekonomi. Bantuan militer dan bantuan pangan merupakan awal mula dari adanya bantuan luar negeri, dan saat ini bantuan luar negeri menjadi semakin umum yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur di negara penerima bantuan (Sarah, 2011: 2). Menurut Alan Rix (1993: 18-19), bantuan luar negeri tidak terlepas dari motivasi dan tujuan dari negara pendonor. Motivasi tersebut seperti halnya kemanusiaan, politik, keamanan nasional dan kepentingan nasional.

Banyak negara besar yang kini memberikan bantuan luar negeri seperti Amerika Serikat, Jepang, Prancis dan juga Tiongkok. Sejak tahun 1950, Tiongkok mulai memberikan bantuan luar negeri yang juga sekaligus menerima bantuan luar negeri. Tiongkok mendukung lebih dari 120 negara berkembang di berbagai wilayah dengan memberikan bantuan luar negeri. Strategi Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri yaitu berupa dana hibah, pinjaman tanpa bunga dan pinjaman lunak (Wioletta, 2015: 201).

Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok pada awalnya diberikan kepada negara-negara yang menganut ideologi komunis. Namun pada pertengahan tahun 1950 Tiongkok mulai memberikan bantuan dan mendukung pembangunan di beberapa negara berkembang. Tiongkok memberikan bantuan asing ke negara berkembang seperti di Afrika, Asia, Amerika latin, Karibia, Oceania dan Eropa Timur. Negara-negara di kawasan Afrika merupakan negara yang menerima

bantuan pembangunan tertinggi dari Tiongkok (Wioletta, 2015: 207). Berikut grafik bantuan luar negeri yang diberikan Tiongkok ke wilayah Afrika.



Gambar 1. Distribusi Bantuan Luar Negeri Tiongkok

Sumber: State Council Information Office of the PRC, 2014, “*White Paper on China’s Foreign Aid*”.

Diagram di atas dapat kita lihat bahwa negara-negara di kawasan Afrika merupakan negara-negara yang paling banyak menerima bantuan luar negeri dari Tiongkok sebanyak 51,80%. Namun, Tiongkok juga memberikan bantuan luar negeri dengan jumlah yang tidak sedikit kepada kawasan lainnya. Sehingga menempatkan Asia di posisi kedua dalam diagram distribusi bantuan luar negeri Tiongkok yang di ikuti oleh Amerika Latin, Karibia, Oceania, dan Eropa.

Tiongkok memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara di kawasan Afrika seperti Sudan, Angola, Afrika selatan, Nigeria, Angola, Algeria, Kongo, dan Kamerun yang fokus terhadap bantuan infrastruktur. Sudan merupakan negara pertama yang menerima bantuan luar negeri dari Tiongkok di kawasan Afrika pada tahun 1955-1972 yang mana pada saat itu terjadi konflik antara *Sudan People Liberty Movement (SPLM)* dan pemerintah Sudan.

Konflik tersebut dilatar belakangi oleh kesenjangan sosial dan ekonomi serta perbedaan perlakuan antara pemerintah terhadap penduduk mayoritas

kristiani wilayah selatan dan penduduk muslim-Arab dibagian utara (Marina, Sadany, 2012: 3). Konflik yang berkepanjangan ini telah memakan 1,5 juta jiwa diselesaikan dengan perjanjian Addis Ababa pada tahun 1983. Namun perang tersebut terjadi lagi hingga tahun 2005 dikarenakan adanya pelanggaran perjanjian antara SPLM dan pemerintah Sudan.

Berlangsungnya konflik yang cukup lama di Sudan akhirnya menemukan kesepakatan damai dengan perjanjian *Naviasha Agreement* pada tahun 2005. Isi perjanjian tersebut memberikan waktu selama enam tahun bagi Sudan Selatan untuk mendapatkan referendum. Setelah enam tahun, Sudan Selatan memisahkan diri dari wilayah utara melalui referendurnya pada 15 Juli 2011. Selama konflik yang terjadi antara SPLM dan pemerintahan Sudan terjadi, banyak bantuan luar negeri yang diberikan baik oleh negara maupun institusi. Bantuan tersebut berasal dari berbagai sumber seperti Amerika Serikat, Uni Eropa (Belanda, Italia, Jerman, Inggris), Arab Saudi, Kuwait, Tiongkok, *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), dan *United Nation*.

Bantuan yang diberikan oleh *World Bank* merupakan sumber terbesar bantuan luar negeri Sudan. *World Bank* meminjamkan dana untuk proyek pertanian, transportasi, dan listrik. Uni Eropa memberikan bantuan luar negeri terutama pada proyek listrik. Selain itu Arab Saudi memberikan bantuan dana yang cukup besar dan juga terus meningkat (Henry, Shalmon, 2008: 15). Tiongkok juga mengambil andil dalam memberikan bantuan luar negeri pada Sudan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk bidang infrastruktur, bangunan publik dan mendatangkan staf profesional (Kabbashi, 2010: 12).

Namun mengingat banyaknya konflik yang terjadi di Sudan juga berpengaruh terhadap bantuan luar negeri untuk Sudan. Bantuan luar negeri yang diberikan kepada Sudan mulai menurun pada tahun 1990 terutama bantuan dari negara-negara Barat (Suci, 2014: 6). IMF yang menutup kantor di Khartoum dikarenakan tunggakan pembayaran hutang Sudan terhadap IMF yang menyebabkan dana pembangunan ditangguhkan selama 10 tahun. Inggris juga membatalkan pembangunan di Sudan dikarenakan dugaan teroris Sudan yang menyerang Sudan ekspatriat yang ada di Inggris. Bantuan dari Arab juga menurun dikarenakan Sudan yang mendukung Iran dalam perang Teluk Persia (Suci, 2014:7). Selanjutnya bantuan dari Amerika Serikat juga menurun dikarenakan pemerintah Sudan gagal dalam membayar hutang eksternal. Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Sudan seperti pemutusan hubungan perdagangan bilateral, membatasi ekspor dan impor, dan menghentikan ekspor peralatan pertahanan dan jasa pertahanan.

Penurunan bantuan luar negeri yang diberikan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Sudan menjadi menurun yang awalnya 4,5% menjadi 1% dan inflasi meningkat yang awalnya 109,32% menjadi 159,27% tahun 2004 (Mundi, 2014:3). Penurunan bantuan luar negeri yang terjadi di Sudan, membuat Sudan mencari bantuan alternatif. Tiongkok merupakan negara yang tetap memberikan bantuan luar negeri kepada Sudan. Tiongkok menawarkan karakter investasi yang murah, cepat dan efektif di bandingkan dengan negara-negara barat. Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai pendonor utama di Sudan.

Tiongkok meningkatkan bantuan luar negerinya kepada Sudan yang berfokus pada bantuan pembangunan ekonomi yang juga termasuk peningkatan

infrastruktur. Peningkatan ini ditandai dengan perjanjian *Economic, Trade and Technical Cooperation* pada tahun 1962. Perjanjian ini menghasilkan proyek-proyek bantuan Tiongkok untuk pembangunan Sudan seperti, pembangunan jembatan di Sungai Nil Putih, pembangunan jalan raya, pendirian Pusat Informasi Minyak, proyek irigasi, rehabilitasi dan meningkatkan kapasitas *Sudan Airways* melalui pinjaman sebesar 180 juta dollar Amerika pada tahun 1996, pembentukan *Gari Power Station* dengan kapasitas 210 kw, pembuatan Sel Surya dengan Departemen Energi pada tahun 1997 (Nour, 2007: 14). Berbeda dengan bantuan luar negeri yang diberikan oleh Barat, Tiongkok memberikan bantuan dengan pinjaman dana dengan bebas bunga untuk pembangunan infrastruktur sebanyak \$1,1 milyar pada tahun 2010 (Ulia, 2011: 6-7).

Peningkatan bantuan Tiongkok juga meningkat pada bantuan pembangunan infrastruktur minyak (Xiao, 2010: 2). Hal tersebut dikarenakan banyaknya sumber daya alam seperti minyak yang di miliki oleh Sudan. Tiongkok melihat adanya potensi minyak yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Sudan dengan adanya pengolahan minyak yang baik. Tiongkok juga memberikan bantuan infrastruktur penyulingan minyak.

Bantuan-bantuan infrastruktur yang diberikan oleh Tiongkok menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik di Sudan dengan ditandainya peningkatan GDP mencapai 5,9% pada tahun 2005 dan dan juga inflasi yang menurun drastis dari 159,27% menjadi 32,56% 1996 hingga 1,93% tahun 2005 (Mundi, 2014: 3).

Terpisahnya Sudan menjadi Sudan Selatan dan Sudan Utara pada tahun 2011 merupakan titik berat bagi kedua negara baru tersebut dalam membangun

perekonomian negara pasca konflik. Menyadari akan banyaknya kebutuhan untuk melakukan pembangunan kembali, kedua negara ini membuka diri kepada investor dan perusahaan asing untuk menanamkan modal di negara tersebut. Tiongkok merupakan pendonor utama yang ada di Sudan. Tiongkok tetap memberikan bantuan luar negeri dengan Sudan Selatan dan Sudan Utara secara terpisah dengan tujuan menghormati kedaulatan negara dan membantu kedua negara dalam pembangunan ekonomi.

1.2 Rumusan masalah

Konflik yang terjadi di Sudan antara SPLM dan pemerintah Sudan memakan waktu yang cukup lama. Konflik yang terjadi membuat banyaknya bantuan luar negeri yang muncul dari berbagai sumber baik itu negara maupun institusi. Tiongkok adalah negara pendonor yang berpengaruh dalam pembangunan di Sudan. Setelah Sudan merdeka tahun 2011 Sudan terbagi atas Sudan Selatan dan Sudan Utara. Sebagai negara yang baru merdeka, kedua negara ini membangun kembali perekonomian mereka. Tiongkok sebagai negara yang berpengaruh terhadap Sudan, memberikan bantuan luar negeri ke Sudan Selatan dan Sudan Utara secara terpisah dengan tujuan menghormati kedaulatan negara. Maka pertanyaan penelitian ini adalah **Bagaimana pelaksanaan dan Motif bantuan luar negeri Tiongkok Sudan pasca merdeka 2011-2014?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan bantuan luar negeri yang diberikan Tiongkok kepada Sudan pasca merdeka pada tahun 2011-2015.
2. Mengetahui motif Tiongkok dalam memberikan bantuan kepada Sudan pasca merdeka pada tahun 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya terkait ilmu-ilmu ekonomi politik global yang ada sebagai salah satu konsentrasi pada ilmu hubungan internasional.

2. Secara praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai bantuan luar negeri apa saja yang diberikan Tiongkok kepada Sudan.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kepentingan Tiongkok dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Sudan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi bahan masukan dalam mengembangkan kajian ekonomi global dan dapat bermanfaat bagi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Dalam hal bantuan luar negeri, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dipaparkan untuk memberikan signifikansi terhadap topik yang di ambil. Seperti halnya penelitian oleh Sara Lengauer, *China's foreign aid policy: Motive and method*. Dalam penelitiannya, Sarah menjelaskan bahwa bantuan luar negeri yang disebut juga sebagai bantuan pembangunan adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Dunia bantuan luar negeri sedang terguncang oleh kekuatan ekonomi pergeseran terjadi di seluruh dunia. Pendatang baru, termasuk Tiongkok, Arab Saudi, Korea, India dan Brazil, secara tidak sengaja mulai mengubah aturan permainan donor baru ini telah mampu meningkatkan volume mereka bantuan ke negara-negara terbelakang sesuai dengan pilihan mereka. Tiongkok merupakan negara berkembang yang pengaruh yang kuat pada tingkatan global (Sara, 2011: 35).

Selanjutnya Sara juga membahas mengenai motif-motif bantuan yang diberikan oleh negara pendonor terhadap negara-negara penerima yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sarah juga membagi menjadi tiga motif Tiongkok dalam pemberian bantuan yaitu motif ekonomi, motif politik, dan ideologi (sarah, 2011: 44). Motif ekonomi tersebut mencakup mengamankan sumber daya alam seperti minyak, tembaga, gas yang sekaligus mencari pasar

untuk meningkatkan perdagangan. Motif politik mencakup pembentukan diplomasi strategis. Motif ideologi mencakup menyebarkan pengaruh komunis yang juga dapat meningkatkan *soft power* Tiongkok.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Severibe Autesserre yang berjudul *United States "Humanitarian Diplomacy" in South Sudan*. Pada awalnya penelitian ini membahas Sudan pasca merdeka yang terbagi menjadi dua wilayah yaitu Sudan dan Sudan Selatan. Dengan terbaginya wilayah tersebut tidak menghentikan konflik yang terjadi. Konflik yang terjadi menimbulkan banyaknya bantuan yang datang dari berbagai negara seperti United States (US).

Bantuan yang diberikan oleh US berupa bantuan pangan dan bantuan yang terkait dengan bantuan kemanusiaan. Penelitian ini mengatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh US mengandung unsur politik (Severibe, 2012: 5). Bantuan pangan dan kemanusiaan menjadi fokus utama bagi US.

US lebih memilih bantuan pangan dan bantuan kemanusiaan dikarenakan untuk menjaga reputasi dan moral agar bantuan yang diberikan tidak disangkupautkan dengan kepentingan politik. Bantuan yang diberikan oleh US berfokus pada bantuan pangan dan infrastruktur. Bantuan ini merupakan strategi US dalam mendapatkan pengaruh yang besar di Sudan Selatan. Bantuan yang diberikan oleh US tetap memiliki kepentingan tersendiri.

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh US bertujuan untuk mengurangi konflik kemanusiaan yang terjadi. Namun hal itu justru memperparah konflik yang terjadi. US mendukung kemerdekaan yang akan didapatkan Sudan Selatan dan akan menghapus Sudan utara yang dianggap sebagai pusat teroris.

Hal tersebut dilakukan US karena kebutuhan akan minyak. Jika konflik terus berlangsung maka kebutuhan minyak US akan terhambat.

Penelitian Joost van der Zwan yang berjudul “*Evaluating The EU’S Role and Challenges in Sudan and South Sudan*”. Peneliti berpendapat bahwa terbaginya Sudan menjadi Sudan dan Sudan selatan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan perdamaian, kemanan dan pembangunan kedua negara tersebut agar tetap berjalan (Joost, 2011: 7). Selain itu, ada beberapa hal yang harus diselesaikan seperti kewarganegaraan, pembagian minyak, perbatasan, mata uang nasional dan pembagian beban hutang.

Untuk membantu menyelesaikan dan menghadapi tantangan yang kemungkinan akan muncul, Uni Eropa dipandang sebagai aktor yang penting dalam dunia internasional yang berkontribusi terhadap pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian dengan meningkatkan ketahanan pangan dan pembentukan pemerintahan yang demokratis. Uni Eropa beranggapan bahwa layanan dasar seperti air, pendidikan dan perawatan kesehatan dapat mengurangi resiko konflik.

Bantuan luar negeri yang diberikan dari berbagai negara maupun institusi pada awalnya dilihat dari krisis yang terjadi di Sudan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Haitam Abdulaziz dan Fung Ding Tian yang berjudul “*The causes of Sudan’s Recent Economics Decline*”. Pada penelitian tersebut Abdulaziz dan Fung menjelaskan bahwa perang sipil yang terjadi di Sudan menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian Sudan selama perang tersebut berlangsung (Haitam, 2014: 28). Menurut penelitian ini, tidak hanya faktor perang yang menjadi penyebab terjadinya krisis di Sudan, Namun terdapat faktor lain seperti

ketidakstabilan situasi negara selama 50 tahun. Terjadi inkonsistensi antara pemerintahan yang demokrasi dan pemerintahan militer yang memiliki prinsip dan gagasan masing-masing serta faktor-faktor tersebut menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan ekonomi (Haitam, 2014: 31). Mengingat perekonomian Sudan yang mengalami krisis, pada awal 1990 sampai 2009, Sudan mengalami pertumbuhan setelah masuknya minyak ke siklus ekonomi Sudan. Namun negara tidak dapat mengola dan memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan ekonomi.

Krisis yang terjadi di Sudan memang merupakan suatu hal yang sangat kompleks bagi pemerintahan Sudan. Seperti penelitian yang dibahas oleh Brian Raftopsulos dan Karin Alexander yang berjudul "*Peace in the Balance: The Crisis in Sudan*". Penelitian ini menjelaskan bahwa krisis merupakan hal yang sangat kompleks bagi Sudan. Latar belakang politik merupakan hal yang penting untuk dibenahi. Selain itu, identitas nasional, agama dan etnis menjadi konteks utama dalam hal perpolitikan Sudan (Raftopsilos, 2015: 7).

Krisis yang terjadi akibat konflik berkepanjangan di Sudan menyebabkan banyak kerugian bagi seluruh sektor di Sudan yang harus adanya perjanjian damai yang harus disetujui oleh pihak yang berkonflik. Pada penelitian ini juga membahas mengenai perjanjian *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) pada Januari 2005 yang mengakhiri perang 21 tahun yang sekaligus pembebasan rakyat Sudan (SPLM). Dengan adanya perjanjian tersebut Sudan terbelah menjadi dua yaitu Sudan Utara dan Sudan Selatan yang telah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 2011. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa ada perpolitikan yang berbeda

antara Sudan dan Sudan selatan yang mana sulit untuk mengembangkan pluralitas terhadap Sudan selatan.

Penelitian selanjutnya dengan tema yang sama yaitu krisis yang terjadi di Sudan dilakukan oleh Manisa Raj yang berjudul "*The Impact of Global financial Crisis in Sudan*". Penelitian yang dilakukan oleh Manisha mengarah pada analisis kondisi ekonomi di Sudan. Negara telah mengalami banyak tekanan dari ekonomi dan sosial yang mana pada pertumbuhan tersebut terkena dampak negatif dari insiden sipil dan militer (Manisha, 2012: 5).

Tidak hanya itu, Sudan dilanda perang saudara, ketidakstabilan politik, cuaca yang baruk, harga komoditas dunia yang lemah, penurunan pengiriman uang dari luar negeri dan terjadi kontra terhadap kebijakan ekonomi (Manisha, 2012: 6). Sudan sebenarnya memiliki sumber daya yang dapat dijadikan alat peningkatan perekonomian. Minyak merupakan sumber daya utama yang dimiliki oleh Sudan. Namun negara belum memanfaatkan sumber daya ke arah yang benar.

Dari ke enam *literatur review* yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian pada setiap Literatur. Terdapat dua literatur yang membahas mengenai motif bantuan luar negeri yaitu *China's foreign aid policy: Motive and method* (2011) dan *United States "Humanitarian Diplomacy" in South Sudan* (2002). Tiga literatur mengenai krisis yang disebabkan adanya konflik antara pemerintah Sudan dan SLPM yaitu *The causes of Sudan's Recent Economics Decline* (2014), *Peace in the Balance: The Crisis in Sudan* (2006) dan *The Impact of Global financial Crisis in Sudan* (2012). Terakhir satu literatur

mengenai tantangan Sudan dan Sudan Selatan sebagai negara pecahan yaitu “*Evaluating The EU’S Role and Challenges in Sudan and South Sudan*” (2011).

Terdapat perbedaan terhadap fokus penelitian terdahulu dengan fokus penelitian penulis. Penelitian penulis berfokus terhadap bantuan luar negeri Tiongkok pasca Sudan merdeka yang terpecah menjadi Sudan dan Sudan Selatan, yaitu pada tahun 2011 sampai dengan 2015 yang menggunakan teori atau konsep bantuan luar negeri dan kepentingan nasional. Pada penelitian ini juga akan menguraikan bentuk bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan serta menganalisis kepentingan nasional yang digunakan Tiongkok dalam memberikan bantuan kepada Sudan.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Bantuan Luar negeri

Dalam hubungan internasional, isu bantuan luar negeri merupakan isu yang penting (Asra, 2014 :2). Bantuan luar negeri menepatkan analisis pada interaksi dua aktor yaitu donor (negara maupun organisasi internasional dan resipien (negara penerima bantuan) sebagai upaya memaksimalkan capaian kepentingan nasional masing-masing aktor dalam kerjasama pembangunan. Dalam pandangan yang luas, bantuan luar negeri mencakup sumber daya yang digunakan untuk menangani masalah kemanusiaan, pembangunan dan kemiskinan di negara-negara berkembang. Bantuan luar negeri juga diartikan sebagai bantuan ekonomi, teknis, atau militer kepada negara lain untuk stabilisasi ekonomi dan *mutual defence* (Guljinder, 2012: 2). Berdasarkan buku Lancaster “ *Foreign aid, Diplomacy, Development, Domestic*” Bantuan luar negeri dapat diartikan perpindahan transfer sumber daya secara sukarela dari suatu negara ke negara

lain, dari pemerintah maupun non pemerintah (Lancaster, 2007: 6). Sumber daya tersebut adalah memberikan bantuan di bidang ekonomi, militer, keuangan maupun teknis.

Bantuan luar negeri menurut Riddell bertujuan untuk berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan di negara-negara miskin (Riddell, 2008: 18). Selain untuk memberikan keuntungan terhadap negara penerima, Lancaster menjelaskan fungsi lain dari bantuan luar negeri yaitu: tanda persetujuan diplomatik, menambah kekuatan dan pengaruh di negara penerima, memperluas pengaruh budaya, sebagai usaha untuk mendapatkan akses ekonomi di negara penerima (Lancaster, 2007: 8).

Dalam bukunya, Lancaster juga menjelaskan dua konsep yang digunakan dalam bantuan luar negeri. Pertama, bantuan luar negeri sebagai *Tricky concept*. Dalam konsep ini bantuan luar negeri tidak hanya sebatas kebijakan luar negeri saja, melainkan alat kebijakan luar negeri suatu negara (Lancaster, 2007: 9). Bantuan luar negeri tidak hanya sebatas istilah transfer sumberdaya saja melainkan alat untuk mendapatkan sumber daya, ekonomi, politik di negara penerima. Kedua, bantuan luar negeri sebagai *purposes*. Konsep ini berarah pada bantuan luar negeri mengenai pemahaman yang lebih luas dari dasar pemberian bantuan dan kemanusiaan. Bantuan ini digerakkan oleh tujuan diplomatik, perkembangan dan kormersialisasi ekonomi sebagai pembawa kepentingan nasional di negara penerima (Lancaster, 2007: 13).

Bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara pendonor tidak hanya berupa dana atau bentuk material kebendaan saja namun juga dapat disalurkan dalam bentuk jasa. Bantuan dalam bentuk dana terdapat tiga tipe yaitu pinjaman

(*loan*), dana hibah (*grants*), dan kerjasama teknis (*technical cooperation*). Pinjaman adalah bentuk bantuan yang menyaratkan pengembalian dengan bunga dan batas waktu tertentu. Hibah adalah bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan termasuk bentuk kerjasama teknis (Astra, 2014: 3). Bantuan luar negeri dalam bentuk jasa digolongkan dalam tiga jenis bantuan yaitu (Roger, 2007, 195-207):

1. Bantuan Program (*Program Aid*)

Bantuan berupa devisa yang diperlukan untuk menutup kekosongan neraca pembayaran yang digunakan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan masyarakat, seperti halnya bantuan pangan dan komoditas.

2. Bantuan Proyek (*Project Aid*)

Bantuan yang diberikan kepada pemerintahan berupa valuta asing yang ditukarkan ke dalam mata uang negara penerima dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan proyek-proyek pembangunan baik dalam rangka rehabilitasi, pengadaan barang atau peralatan dan jasa serta perluasan atau pengembangan proyek-proyek pembangunan baru.

3. Bantuan Teknik (*Technical Assistance*)

Bantuan yang diberikan berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. Bantuan teknik ini dimungkinkannya ahli teknologi yaitu dengan mengisi kekosongan dalam bidang tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja dalam negeri.

Penelitian ini, jenis bantuan yang dimaksud adalah bantuan berupa pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas kapital fisik dan juga termasuk kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dibagi menjadi dua yaitu infrastruktur ekonomi dan sosial (Gianpiero, 2009: 9). Infrastruktur ekonomi seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, saluran pembuangan dan gas, serta pekerjaan umum proyek transportasi. Infrastruktur mengacu pada fasilitas dan mekanisme yang menjamin pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan sosial.

Bantuan luar negeri terkadang dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan, tetapi tidak hanya kebijakan melainkan alat dari kebijakan (Lancaster, 2007: 11). Bantuan luar negeri tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, namun juga masalah politik yang sulit untuk dipisahkan meskipun bantuan yang diberikan adalah bantuan hibah yang mana negara penerima tidak harus mengembalikannya. Kepentingan atau motif dalam bantuan luar negeri yang menarik untuk diteliti.

2.2.2 Motif Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri terdapat dua aktor penting yaitu donor dan *recipient*. Donor merupakan negara atau organisasi yang memberikan bantuan dan *recipient* negara penerima bantuan (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen, 2003;17). Bantuan luar negeri dapat datang dalam berbagai bentuk yang diberikan oleh banyak donor dan didistribusikan pada banyak penerima.

Salah satu elemen penting dalam terjadinya proses bantuan luar negeri adalah motif. Motif secara sederhana diartikan oleh banyak orang sebagai alasan, faktor atau dorongan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Giddens motif bantuan luar negeri diartikan sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan aktor negara ke arah pemuasan kebutuhan (Giddens, 1991:64). Hal ini kemudian mengerucutkan bahwa motif adalah dorongan yang digunakan untuk melakukan sesuatu, di mana ketika aktor melakukan sesuatu hal itu menandakan aktor tersebut ingin mencapai suatu tujuan. Motif bantuan luar negeri hadir bergantung pada tujuan dan kepentingan negara donor. Adanya motif juga dikarenakan akibat perubahan kepentingan dari sebuah negara (Eva Faber, 2011; 6). Motif dalam bantuan luar negeri memiliki dua makna yaitu “*because they need our help*” dan “*because we’ve got something to gain*” (Eva Faber, 2011; 25).

Mengenai pembahasan motif bantuan luar negeri, terdapat dua kutub yang berbeda dalam melihat motif bantuan luar negeri yaitu *altruism* dan *Self-Interest*. Kedua kutub tersebut memunculkan penengah yaitu *enlightened Self-Interest* (Carol Lancaster, 2007, 12). Paradigma *altruism* merupakan ide perspektif idealisme dan liberalisme. Paradigma ini menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan kewajiban untuk membantu mensejahterahkan negara-negara miskin dengan meminimalkan kepentingan nasional. Sedangkan *Self-Interest* diwakili oleh perspektif realisme dan neorealisme yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk mencapai kepentingan negara.

Kedua perdebatan ini memunculkan konsep yang menyatakan bahwa donor tidak memberikan bantuan semata-mata berdasarkan kepentingan atau *altruism*. Bahwa bantuan luar negeri diberikan selain menjadi kewajiban moral juga sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Ketiga perdebatan paradigma tersebut, Lancaster lebih menekankan pada paradigma *self-Interest*. Lancaster juga membagi motif bantuan luar negeri berdasarkan kepentingan negara yaitu ekonomi, politik dan keamanan (Lancaster, 2007: 13).

Berbeda dengan paradigma Lancaster, Degnbol-Martinussen and Engberg-Pedersen lebih menekankan pada paradigma *elighted self-interest* atau konsep yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri tidak hanya untuk kepentingan nasional, namun juga hubungan yang saling menguntungkan. Ketika donor memberikan bantuan, donor sering mencari solusi seperti win-win. Dalam memberikan bantuan luar negeri Degnbol-Martinussen and Engberg-Pedersen dalam bukunya *Aid Understanding International Development Cooperation* membagi motif bantuan luar negeri menjadi tiga jenis yaitu:

1. Motif Politik, pada motif ini bantuan luar negeri menjadi instrumen utama yang digunakan negara donor untuk mencapai keamanan nasional dan kepentingan politik. Pemberian bantuan luar negeri yang ditujukan untuk jangka panjang hubungan antara negara donor dan negara penerima (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pederse, 2003;11).
2. Motif Ekonomi, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada

kepentingan negara donor. Selain itu motif ekonomi sering kali menjadi alasan utama dalam pemberian bantuan luar negeri oleh negara industri maju. Motif ekonomi menentukan bagaimana negara donor 'memilih' negara penerima bantuannya dan menentukan metode pemberian bantuan luar negeri. Negara-negara miskin menjadi konsentrasi pemberian bantuan yang lebih besar. Bantuan ini diberikan tidak hanya untuk penghormatan dan moral namun juga untuk memastikan keterbukaan terhadap akses sumber daya dan pasar di negara penerima bantuan Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen, 2003;13). Bantuan dalam motif ekonomi ini bersifat *tied aid* yang mengacu pada permintaan negara donor untuk menggunakan hibah atau pinjaman luar negeri yang diberikan dalam jenis komoditas atau jasa yang berasal dari negara donor.

3. Motif Kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga dengan dukungan kerjasama ekonomi. Motif ini didasari atas tanggung jawab moral untuk membantu negara miskin. Pemberian bantuan luar negeri dipandang sebagai bentuk *charity* dan mempertimbangkan negara miskin untuk dapat menikmati sumber daya secara leluasa. Pemberian bantuan luar negeri pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi negara donor dalam jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan adanya ketergantungan antara negara penerima dan negara donor. Pada motif ini, bantuan luar negeri disalurkan melalui organisasi multilateral yang bersifat murni dan berakar pada

motif moral dan kemanusiaan (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen, 2003: 12).

Ketiga motif tersebut merupakan motif yang saling berkaitan. Motif kemanusiaan berperan sebagai pendorong bantuan agar tidak dikaitkan dengan kepentingan politik, sedangkan motif politik berperan untuk mendapatkan citra yang baik dan pengaruh yang besar di negara penerima bantuan. Selain itu ada dua kelompok motivasi pemberian bantuan yaitu mereka yang fokus terhadap manfaat negara donor dan mereka yang fokus terhadap manfaat negara penerima.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir ini, peneliti akan mencoba menjelaskan permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui motif bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan pasca merdeka. Permasalahan tersebut akan diteliti dan akan digabungkan dengan konsep yang akan disusun dalam kerangka pikir. Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka peneliti akan menjelaskan menggunakan konsep bantuan luar negeri dan motif bantuan luar negeri.

Kerangka pikir diawali dengan konflik berkepanjangan yang terjadi di Sudan sehingga menjadikan Sudan menjadi Sudan Selatan dan Sudan Utara. Pecahnya Sudan menjadi dua negara membutuhkan adanya pembangunan ekonomi sebagai negara baru. Untuk mencapai pembangunan ekonomi, Kedua negara membutuhkan modal. Salah satu sumber untuk mendapatkan modal adalah bantuan luar negeri.

Bantuan luar negeri yang hadir dalam pembangunan ekonomi di Sudan adalah bantuan luar negeri yang berasal dari Tiongkok. Tiongkok merupakan

negara yang berpengaruh dalam memberikan bantuan luar negeri di Sudan. Ada beberapa negara dan lembaga internasional yang turut memberikan bantuan luar negeri namun bantuan tersebut terhenti. Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai negara pendonor utama di Sudan. Setelah Sudan terpecah menjadi Sudan Selatan dan Sudan Utara, Tiongkok memberikan bantuan secara terpisah kepada kedua negara tersebut dengan tujuan untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara.

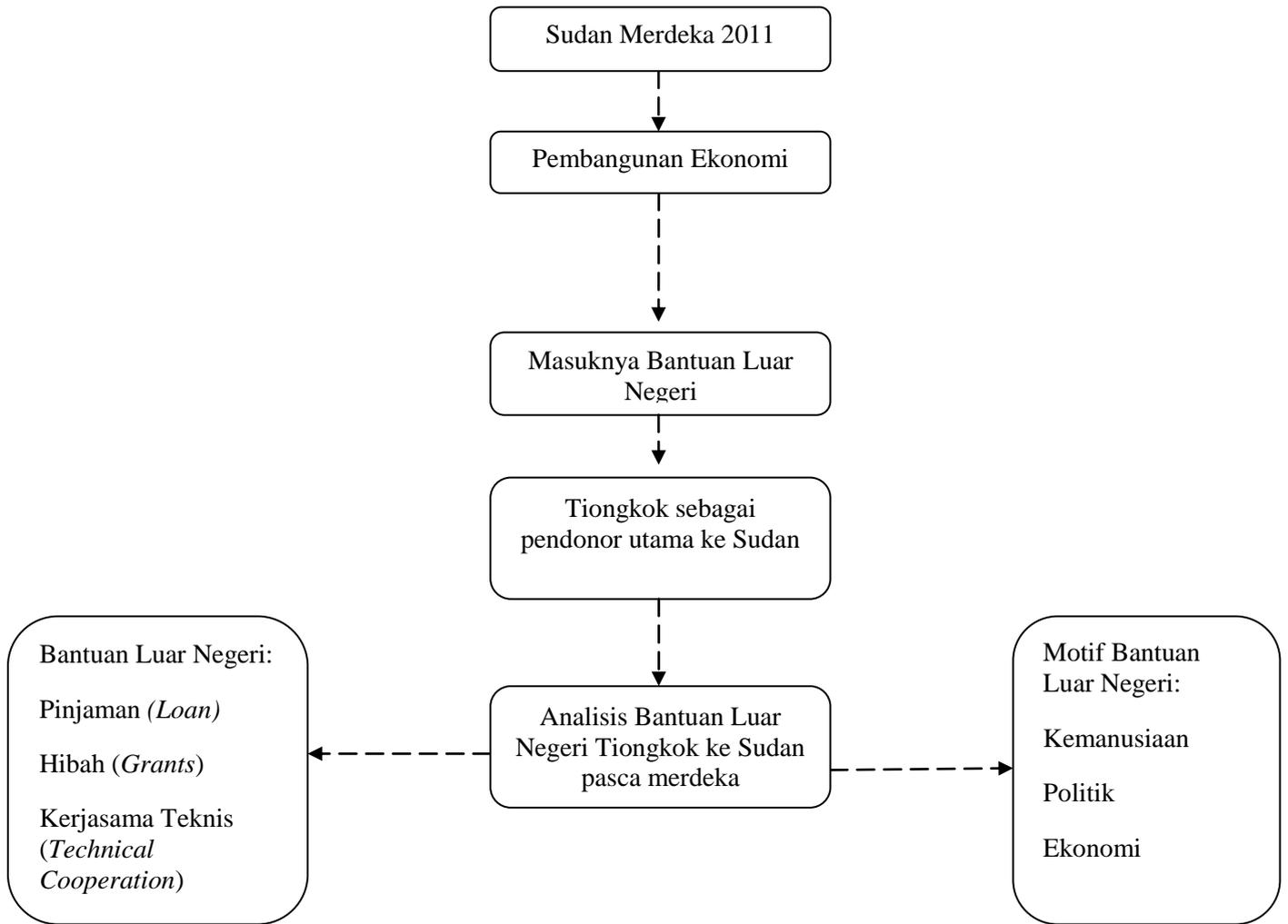
Pelaksanaan bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok akan dianalisis menggunakan konsep bantuan luar negeri dan motif bantuan luar negeri. Dengan menggunakan konsep tersebut akan mendeskripsikan pelaksanaan bantuan luar negeri Tiongkok masuk pada jenis:

- Bantuan pinjaman (*Loan*)
- Hibah (*Grants*)
- Kerjasama Teknis (*Technical cooperation*).

Tiga jenis bantuan tersebut juga akan dianalisis dengan konsep motif bantuan luar negeri yang digolongkan menjadi tiga yaitu:

- Kemanusiaan
- Politik
- Ekonomi

Berikut adalah kerangka pemikiran penulis apabila disederhanakan dengan menggunakan skema:



Gambar 2. Kerangka Pemikira

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren. Penelitian kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktivitas-aktivitas, serta proses-proses sosial. Penelitian ini berfokus pada makna (*meanings*) dan pemahaman (*understanding*) dari pada kuantifikasi.

Penelitian ini mempelajari fenomena dan aktor-aktor yang terlibat dalam studi kasus ini. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yaitu mempelajari fenomena dan aktor-aktor dalam setting alamiah mereka, untuk memahami proses dan fenomena melalui makna para aktor dan partisipan memberi mereka dalam istilah mereka sendiri (Norman, 2011: 1-3).

Metode penyajian data dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Data akan disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif yang berarti menggambarkan atau melukiskan perilaku atau fenomena yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata yang sesuai, kemudian dianalisis, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi (Husnaini, 2008: 130). Keseluruhan tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman

tentang bagaimana membuat arti dari suatu peristiwa, menggambarkan proses (bukan hasil atau produk) pembuatan makna, dan menggambarkan bagaimana menafsirkan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini tipe analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana bantuan luar negeri Tiongkok terhadap Sudan pasca merdeka yaitu kepada Sudan Utara dan Sudan Selatan.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya diperlukan fokus penelitian untuk menghindari terlalu melebarnya objek penelitian dan juga memberi batas-batas hal-hal apa saja yang akan menjadi fokus penelitian kita. Batas-batas penelitian akan membantu untuk mencari data-data yang relevan dengan penelitian dan mengidentifikaasikan faktor-faktor mana saja yang akan masuk ke dalam ruang lingkup penelitian (Hisnaini, 2008: 24). Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bantuan luar negeri Tiongkok kepada Sudan pasca merdeka yaitu Sudan Utara dan Sudan Selatan yang digolongkan dalam tiga jenis bantuan yaitu:

- Pinjaman (*Loan*), pelaksanaa pemberian pinjaman Tiongkok kepada Sudan pasca merdeka pada tahun 2011-2014.
- Hibah (*Grants*), pelaksanaa pemberian hibah Tiongkok kepada Sudan pasca merdeka pada tahun 2011-2014.
- Kerjasama Teknis (*Technical cooperation*), pelaksanaa pemberian kerjasama teknis Tiongkok kepada Sudan pasca merdeka pada tahun 2011-2014.

Selanjutnya, untuk melihat motif bantuan luar negeri akan menggunakan tiga kriteria Motif bantuan luar negeri yaitu :

- Kemanusiaan
- Politik
- Ekonomi

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Peneliti memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber baik berupajurnaljurnal ilmiah, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif sumber data utama yang digunakan adalah penelitian berbasis internet, penelitian berbasis dokumen atau arsip.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian dan menjadi instrumen penting di dalam suatu penelitian. Data memiliki beberapa ciri yang dapat diklasifikasikan menurut kekhususan tertentu, sesuai dengan maksud penelitian ataupun sumber data yang digunakan (Burhan, 2013: 125). Penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu menggunakan literatur atau dokumentasi yang tersedia. Adapun teknik pengumpulan data yaitu:

1. Studi Literatur (*Library research*)

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang tersedia sesuai dengan tema penelitian. Data

tersebut diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal-jurnal dengan tema yang relevan, makalah, artikel, dan surat kabar. Peneliti menggunakan sumber data bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan dari AidData Chinese 2017 yang mana data tersebut diolah oleh peneliti menggunakan microsoft excel. Selain itu, buku yang digunakan sebagai rujukan adalah buku dari Roger Ridell yang berjudul “*Does Foreign Aid Work*”. Artikel dan Surat kabar yang peneliti gunakan adalah artikel atau Surat kabar resmi dari pemerintah Tiongkok maupun Sudan dan Sudan Selatan Seperti *Sudan National Voluntary Report, White Paper Tiongkok* aartikel tersebut digunakan sebagai pendukung argumen peneliti.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan menelaah sejumlah dokumen-dokumen resmi. Selain itu penulis juga memperoleh data dari portal berita internasional dan juga situs resmi seperti sudan.gov.in, imf, world bank, china daily, china gov, aid data, china embassy.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *secondary analysis*. Analisis data sekunder digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik analisis dengan menggunakan data yang sudah ada, baik data yang dikumpulkan oleh peneliti lain maupun yang dikumpulkan oleh instansi-instansi pemerintah, baik untuk meneliti pertanyaan penelitian baru maupun meneliti pertanyaan penelitin utama (yang asli) untuk keperluan pembuktian (Janet, 2004: 1).

Proses analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis data menurut (Miles dan Huberman, 1994: 10-12), ada tiga tahap dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi data

Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data-data yang relevan dengan cara studi dokumentasi dan studi literatur. Data yang diperoleh akan diolah hingga mendapatkan data yang dapat memperkuat argumen. Proses reduksi ini membantu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian. Data yang peneliti gunakan adalah data total keseluruhan bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan tahun 2011-2014 yang didapatkan dari AidData Chinese 2017. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan bentuk bantuan seperti hibah, kerjasama teknis, pinjaman dan alokasi bantuan.

2. Penyajian data (*display*)

Setelah melakukan pengelompokan data, selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang telah dikumpulkan disajikan dalam sebuah tabel, diagram, dan juga grafik. Penyajian tersebut bertujuan untuk mempermudah membaca data dan data yang telah terkumpulkan memberikan adanya kemungkinan untuk menarik kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Peneliti menafsirkan makna dari masing-masing data yang didapat. Setelah mendapatkan makna dari masing-masing data tersebut, peneliti menyusunnya dalam kalimat sistematis yang kemudian data tersebut

merupakan dukungan bagi argumen peneliti. Makna penting yang didapatkan peneliti dari data literatur dan dokumen resmi dikaitkan dengan konsep bantuan luar negeri dan motif bantuan luar negeri serta pembahasan yang terdiri atas pelaksanaan dan motif bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan 2011-2014.

IV. GAMBARAN UMUM

Bab ini akan memaparkan kondisi umum negara-negara yang terlibat di dalam penelitian ini, yaitu Tiongkok, Sudan Utara dan Sudan Selatan. Paparan dibagi menjadi tiga bagian. Dalam bab ini akan menjelaskan kondisi umum Tiongkok, perkembangan ekonomi Tiongkok dan kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok pada bagian pertama, bagian kedua akan menguraikan sejarah singkat mengenai terpecahnya Sudan, pada bagian ketiga menguraikan hubungan Tiongkok dan Sudan sebelum merdeka.

Ketiga bagian itu penting untuk diuraikan karena Tiongkok dan Sudan menjadi Subjek analisis jadi perlu menjelaskan Gambaran Tiongkok dan Sudan secara umum baik politik maupun ekonomi. Selain itu juga perlu menjelaskan bantuan luar negeri yang diberikan Tiongkok karena bantuan luar negeri merupakan unit analisis pada penelitian ini. Selain itu perlunya menguraikan hubungan Tiongkok dan Sudan sebelum merdeka agar dapat mengetahui hubungan yang terjalin dan bantuan apa saja yang diberikan.

Tiongkok menjadi negara Republik pada 1 Januari 1912, kemudian pada 1 Oktober 1949 Tiongkok berubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang memiliki populasi penduduk terpadat di dunia dengan

peringkat pertama di atas India dan Amerika. Menurut World Bank, jumlah penduduk Tiongkok pada tahun 2017 adalah 1.379 dan Secara geografis luas wilayah Tiongkok adalah 9.596.961 km² (CIA Gov, 2017:1). Angka kepadatan penduduk tersebut meningkat setiap tahunnya. Banyaknya jumlah penduduk yang ada di Tiongkok menjadi Sumber daya yang paling penting dalam proses pencapaian kemajuan suatu bangsa. Jumlah penduduk yang banyak dapat mendukung perkembangan sumber daya manusia terutama bagi perkembangan sektor industri, produksi, perdagangan dan pembangunan. Ketika suatu negara banyak memiliki sumber daya manusia yang produktif maka akan menghasilkan produksi yang besar dan berkualitas.

Tiongkok merupakan negara yang menganut ideologi komunis. Terdapat partai yang memiliki peran penting dalam perpolitikan di Tiongkok yaitu partai komunis. Partai ini di dirikan oleh Mao Zedong pada tahun 1921 (*One World Nation*, 2016:1). Partai komunis Tiongkok di sebut dengan (PKT). Partai ini merupakan partai terbesar di Tiongkok saat pemerintahan Mao Zedong. Partai komunis ini memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan. Selama pemerintahan Mao, Tiongkok menerapkan sistem ekonomi yang tertutup. Sistem ekonomi yang seperti ini menyebabkan tutupnya hubungan ekonomi Tiongkok dengan negara lain. Namun semnjak tahun 1970 Tiongkok beralih dari perekomian tertutup ke perekonomian yang lebih berorientasi pada pasar dan mengambil peran dalam pasar global (CIA Gov, 2016:1).

4.1 Perkembangan Ekonomi Tiongkok

Tiongkok pada awalnya menggunakan sistem ekonomi sosialis di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Sistem sosialis tersebut memusatkan perhatian pada pembangunan industri berat, fasilitas, transportasi serta mengendalikan inflasi dan pengeluaran pemerintah. Dalam pemerintahan Mao Zedong dapat dibagi ke dalam dua dekade. Dekade pertama (1949-1957) adalah proses industrialisasi dari pertanian menuju industri, pada dekade ini pemerintah lebih memusatkan pada penggunaan teknologi dalam pengolahan produk. Sedangkan dekade kedua ketika mulai terjadi krisis ekonomi pada tahun 1960-1962 (ChuYuan, 1971: 13). Pada dekade kedua terjadi krisis ekonomi di Tiongkok yaitu pemerintah mengubah skala prioritas dari industri kembali ke pertanian. Ribuan buru yang bekerja di kota kembali ke desa untuk fokus pada pertanian. Pemerintah juga membatasi industri-industri kecil.

Mao Zedong mengambil kebijakan tersebut untuk membangkitkan ekonomi Tiongkok melalui industrialisasi dan memanfaatkan penduduk Tiongkok yang banyak untuk menjadi buruh dengan upah yang murah. Namun langkah yang dilakukan Mao justru mengakibatkan kelaparan. rakyat yang dipekerjakan berketerampilan rendah sehingga produk yang dihasilkan berkualitas rendah (Sutopo, 2009: 27). akibat keggalan tersebut Mao mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua partai komunis Cina.

Kehadiran Deng Xiaoping menggantikan Mao menitik beratkan terhadap pembangunan. Sistem ekonomi yang sebelumnya dianut oleh Tiongkok merupakan salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Deng Xiaoping membawa program reformasi yaitu membuka diri

dengan menggabungkan sistem sosialis Tiongkok dengan sisi positif kapitalisme. Tiongkok membangun “ekonomi pasar sosialis”, sebuah sistem ekonomi dimana kepemilikan publik diutamakan dan perusahaan negara turut di kembangkan agar mendapat untung dan berjakan efisien seperti perusahaan swasta (Bowono, 2008:12) Selain itu dengan reformasi sistem ekonomi, Tiongkok berhasil menerapkan politik “pintu terbuka”, modal asing diundang masuk untk diberikan banyak kemudahan. Modal asing yang masuk ke Tiongkok diharapkan memiliki aset 50 hingga 70 tahun. Pada tahun 1998-2001 FDI mencapai lebih dari US\$ 73 milyar dan pada tahun 2002 meningkat hingga 20% (Bank Of China, 2011: 1). Dengan begitu Tiongkok mulai menggantikan AS sebagai tempat FDI yang menarik perhatian dunia.

Selain masuknya modal asing, dengan adanya sistem ini membuat Tiongkok memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara yang ada di dunia. Tiongkok mengadopsi pendekatan toleran terhadap pengembangan hubungan dengan negara di luar wilayah tersebut. Tiongkok mulai memasuki era perdagangan multilateral setelah masuk dalam WTO (*World Trade Organization*) secara resmi tahun 2005. Setelah bergabung dengan WTO Tiongkok memulai kerjasama perdagangannya dengan negara di kawasan Asean, Afrika, dan Amerika Latin. Tiongkok membuka kerjasama dengan negara berkembang dengan alasan kepentingan ekonomi dan politik. Selain itu juga banyak negara berkembang di kawasan tersebut yang bermasalah dengan Amerika Serikat dan Eropa.

Dengan Adanya sistem ekonomi terbuka, perdagangan luar negeri menjadi faktor penentu bagi ekonomi Tiongkok. Beberapa kawasan menjadi penting

bagi perdagangan dan modal Tiongkok. Menurut Statiska Tiongkok total perdagangan Tiongkok dari tahun 2005-2010 (MOFCOM, 2011: 1).

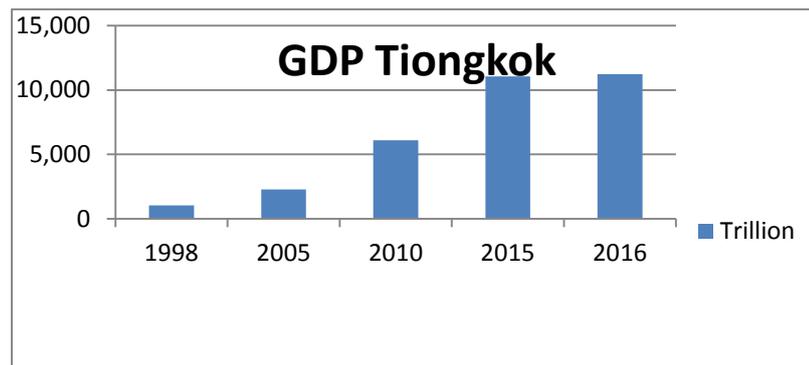
- Proporsi dengan ASEAN meningkat dari 92% menjadi 9,8%
- Proporsi dengan Amerika Latin meningkat dari 3,5% menjadi 6,2%
- Proporsi dengan Afrika meningkat dari 2,8% menjadi 4,3%

Di antara tiga kawasan tersebut, proporsi perdagangan ASEAN lebih banyak dari kawasan lainnya. Hal tersebut menjadikan hubungan ekonomi Tiongkok dan ASEAN menjadi lebih meningkat.

Hubungan ekonomi Tiongkok dan negara anggota ASEAN meningkat dari tahun 1990. Saat itu Tiongkok belum memiliki perjanjian yang formal dengan ASEAN. Namun hubungan yang terjadi hanya hubungan bilateral antara Tiongkok dan negara anggota ASEAN. Perdagangan bilateral Tiongkok dan negara anggota ASEAN meningkat 20,4% dan mencapai 39,5 milyar USD pada tahun 2011 (Volgi, 2011: 83).

Dapat di lihat pada grafik tahun 2009 terjadi sedikit penurunan yang diakibatkan adanya krisis keuangan dan meningkat jauh pada tahun 2010. Total perdagangan bilateral Tiongkok dan ASEAN mencapai 392,3 milyar pada tahun 2011. Di antara negara anggota ASEAN Singapura dan Malaysia adalah dua mitra utama perdagangan Tiongkok yang mewakili hampir setengah perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN.

Adanya hubungan ekonomi dengan negara di kawasan lain juga mempengaruhi GDP Tiongkok yang meningkat setiap Tahunnya.



Gambar 3. GDP Tiongkok Tahun 1998-2016

Sumber: World Bank, GDP Tiongkok

Hubungan ekonomi Tiongkok berhasil dengan diimbangi dengan peningkatan jumlah investasi. Tiongkok juga mampu memperoleh bahan baku dan sumber daya energi. Sedangkan negara-negara berkembang menadapatkan akses untuk pengolahan dan pembangunan sumbet daya.

4.2 Kebijakan Bantuan Luar negeri Tiongkok

Republik rakyat Tiongkok bukanlah pendatang baru dalam dunia bantuan luar negeri. Tiongkok memulai bantuan luar negerinya kepada negara-negara berkembang dan negara miskin pada tahun 1950. Tiongkok telah menyediakan pendanaan dan layanan untuk sebagian organisasi multilateral dan secara relatif telah terbentuk kemitraan yang erat dengan organisasi dunia maupun regional seperti United Nation Development Programme, World Bank dan Asian Development Bank. Terbentuknya kemitraan tersebut dengan organisasi internasional bertujuan untuk mempermudah Tiongkok dalam memberikan bantuan ke pada negara-megara lain. Sesuai dengan arah dan kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok dibagi menjadi lima tahap perkembangan:

- Bantuan luar negeri Tiongkok (1950-1970)

Setelah Tiongkok berdiri sebagai negara baru, Mao Zedong mengedepankan kebijakan diplomasinya. Selama periode ini Tiongkok bergabung dengan lembaga pembangunan multilateral seperti UNDP, World Bank dan institusi lainnya (Xiong, 2017: 61-57). Periode ini merupakan tahap awal bantuan luar negeri Tiongkok dengan demikian bantuan yang diberikan tidak sistematis dan tidak kontinu. Tiongkok juga menyediakan bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui organisasi multilateral. Tiongkok memberikan bantuan dana sebesar 10.000\$ kepada Komite Palang Merah Internasional untuk membantu bencana alam (*Chinese Red Cross*, 2014:1).

Pada fase ini juga terdapat perubahan yang signifikan dalam politik internasional. Pecahnya Sino-Soviet berpengaruh terhadap kebijakan diplomatik Tiongkok. Pecahnya dua negara tersebut membuat Tiongkok di kenal sebagai negara ramah dengan memberikan bantuan kepada negara-negara miskin. Bantuan yang diberikan Tiongkok memiliki karakteristik kebutuhan geo-politik dan ekspor ideologis. Tiongkok mulai memberikan bantuan kepada negara-negara sosialis di kawasan Afrika dengan tujuan yang jelas pada pertimbangan ideologis (Xiaoyun, 2007: 7). Bantuan luar negeri menjadi instrumen yang penting tidak hanya untuk ekspor ideologis namun juga untuk persaingan dengan Uni Soviet untuk mendapatkan status internasionalnya sendiri. Pada Akhir 1971, kebijakan luar negeri dibatasi dengan pertimbangan politik yang kuat. Hampir tidak ada keuntungan ekonomi yang didapat oleh negara donor. Bantuan yang

diberikan ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan negara penerima. Selama periode ini, Tiongkok memberikan bantuan luar negeri berupa dana sebanyak 5,584 milyar RMB (Xiaoyun, 2007: 10).

- Bantuan luar negeri Tiongkok (1971-1980)

Bantuan luar negeri yang diberikan Tiongkok harus berdasarkan kedaulatan dan kesetaraan negara penerima tanpa syarat apapun atau menuntut hak istimewa. Negara donor juga tidak boleh mengganggu permasalahan internal negara penerima (Xiong, 2017: 52). Bantuan luar negeri yang diberikan Tiongkok pada periode ini adalah bantuan ekonomi dan bantuan teknis. Tiongkok juga mulai bergabung dengan lembaga organisasi internasional untuk melancarkan bantuan luar negeri yang di berikan. Lembaga internasional tersebut seperti United Nations Environment Programme, the United Nations Development Programme, the World Health Organization, UNESCO, the United Nations Industrial Development Organization (Xiong, 2017: 53). Pada periode ini landasan dalam memberikan bantuan luar negeri terdapat pada *Five Principles for Peaceful Coexistence* yaitu saling menghormati integritas dan kedaulatan teritorial masing-masing, tidak saling menyenrang, tidak saling campur tangan dalam urusan intenal masing-masing, kesetaraan dan kerjasama untuk saling menguntungkan, dan hidup bersama dengan damai (Kristian, 2010: 4). Hasil dari kebijakan ini tidak terlalu berdampak kepada perekonomian negara pendonor dan negera penerima. Hal ini dikarenakan *Ideological Promotion* hanya digunakan untuk penyatuan identitas secara simbolik

dengan kata lain sesama negara berkembang harus saling membantu. Tiongkok mulai memberikan bantuan luar negerinya kepada negara sosialis dan nasionalis di Asia dan Afrika. Bantuan yang diberikan Tiongkok ke Asia berupa bantuan dana sebesar 5,983 milyar RMB yang diberikan dengan tujuan untuk membantu perekonomian negara penerima (Xiaoyun, 2007: 7).

- Bantuan negeri Tiongkok (1980-1990)

Reformasi Tiongkok yang dimulai pada 1978. Bantuan luar negeri Tiongkok pada fase ini di pengaruhi oleh reformasi kebudayaan. Reformasi tersebut membawa perubahan yang signifikan pada bantuan luar negeri Tiongkok. Tiongkok merumuskan kebijakan yang berpusat pada konstruksi ekonomi dan memperkenalkan negara yang berbasis teknologi dan modal untuk pengembangan ekonomi domestik. Bantuan luar negeri yang diberikan seperti halnya proyek pembangunan yang pada dasarnya dapat mencakup semua aspek masyarakat. Bantuan yang diberikan Tiongkok berupa dana sebanyak 25 milyar USD pertahun dan 5 milyar USD masuk dalam bantuan jenis hibah (Chinese Red Cross, 2010: 1).

Bantuan luar negeri pada fase ini menitik beratkan pada perkembangan ekonomi dan secara bertahap meninggalkan kebijakan bantuan yang sebelumnya yang berfokus pada ekspor ideologi. Pada 1978 Tiongkok mulai melakukan penyesuaian bantuan luar negeri. Bantuan yang diberikan Tiongkok tidak diberikan secara universal tanpa syarat. Tetapi mengutamakan bantuan yang saling menguntungkan

berdasarkan kapasitas dan kebutuhan yang sebenarnya. Pada fase ini bantuan luar negeri mulai meluas ke kawasan Amerika Latin dan Karibia. Tiongkok menawarkan bantuan satelit murah dan memberikan dana sebanyak \$250 milyar untuk pembangunan infrastruktur di Amerika Latin dan Tiongkok memberikan pinjaman dana sebesar \$31 milyar dengan bunga yang rendah ke Karibia (*International News*, 2011:1). Pinjaman tersebut diberikan untuk membantu pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan pembanguana listrik gas alam.

- Bantuan luar negeri Tiongkok (1991-2004)

Tiongkok mengeluarkan empat prinsip dalam memerikan bantuan luar negeri pada periode ini. Empat prinsip tersebut menyangkut prinsip persamaan dan saling menguntungkan, hasil praktis, ragam bentuk bantuan dan pembangunan (Kristian, 2010: 7). Ini menandakan bahwa bantuan luar negeri Tiongkok mengalami perkembangan yang komprehensif. Pemerintah Tiongkok menyatakan akan terus membantu negara dunia ketiga meskipun dana terbatas. Dalam memberikan bantuan luar negeri, Tiongkok mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekonomi, politik dan diplomasi. Pada tahun 1983 fokus bantuan luar negeri bergeser untuk mengamankan pertumbuhan ekonomi di tengah terjadinya restrukturisasi atau penurunan suku bunga di domestik (Kristian, 2010: 4).

Pada periode ini, reformasi bantuan Tiongkok memiliki dua pendekatan. Pertama pinjaman khusus, menggunakan dana perbankan

dan mengurangi bunga pinjaman melalui subsidi pemerintah. Kedua menawarkan dukungan pendanaan perusahaan yang saling menguntungkan. Selain itu juga bantuan Tiongkok dapat berupa usaha patungan (*Joint venture*), perasi koperasi atau koperasi yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok. Pada fase ini bantuan Tiongkok di perluas hingga kawasan Eropa. Tiongkok memberikan bantuan dana sebesar \$100 milyar (*BBC News*, 2010: 1).

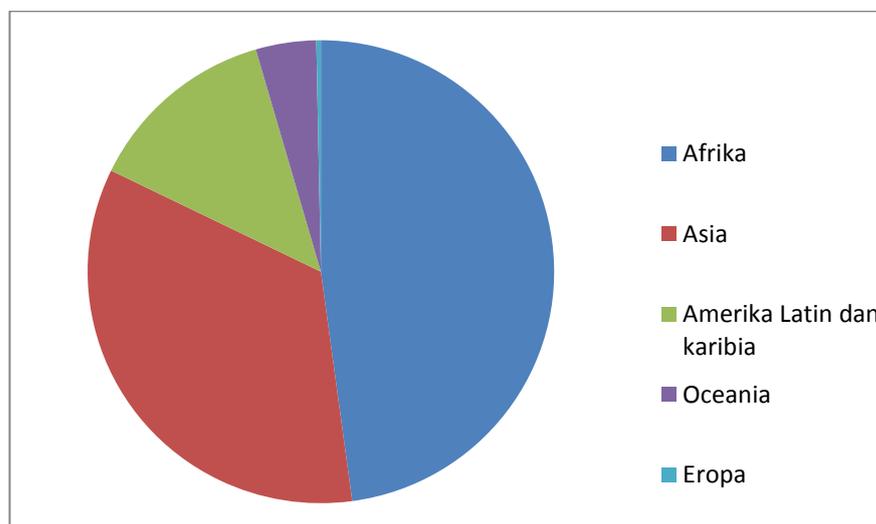
- Bantuan luar negeri Tiongkok (2005-sekarang)

Tiongkok telah mendapatkan pemahaman mengenai bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri merupakan komponen penting dari strategi politik. Pada fase ini bantuan luar negeri Tiongkok berbasis pada bantuan keuangan dan kerjasama teknis untuk mencapai integrasi. Bantuan luar negeri juga menjadi komponen penting dalam merumuskan sistem dan aturan ekonomi. pada tahap ini bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok lebih fokus terhadap bantuan luar negeri yang saling menguntungkan dan semakin mendasar menjadi bantuan teknis serta perilaku mencari keuntungan. Kebijakan bantuan luar negeri juga tidak lagi didasarkan pada ideologi namun berbasis pada ekonomi (*BBC News*, 2010: 1).

Pada periode ini juga Tiongkok memberikan bantuan kerjasama multilateral yang dapat mengembangkan ekonomi negara penerima dengan memberikan peralatan teknis moderen, didirikan bantuan dana khusus berbagai bentuk dan hibah mikro fleksibel. Awal 2005 Tiongkok telah melakukan kerjasama bantuan yang menguntungkan.

Pertama, Negara-negara yang telah menerima bantuan dari Tiongkok yang berawal dari Afrika di perluas ke Asia, Amerika latin dan karibia, oecania dan eropa Timur. Kedua, mempromisikan bantuan luar negeri sebagai kerjasama yang saling menguntungkan, untuk pengembangan ekonomi, meningkatkan sumberdaya manusia dan berkontribusi pada pengembangan timbal balik Tiongkok terhadap negara penerima.

Pada ahir tahun 2009 Tiongkok memberikan bantuan luar negeri ke 123 negara berkembang di wilayah Asia sebanyak 30 negara, di wilayah Afrika sebanyak 51 negara, di wilayah Amerika Latin dan karibia sebanyak 18 negara, di wilayah Oceania 12 negara dan di wilayah Eropa timur sebanyak 12 negara. Asia dan Afrika menjadi penerima bantuan terbanyak dari Tiongkok sebnayk 80% (*China Foreign Aid*, 2011: 11). Berikut ini adalah distribusi bantuan Tiongkok di lima kawasan:



Sumber: China's Foreign Aid Information Office of the State Council 2009

Gambar 4. Distribusi Bantuan Tiongkok Akhir 2009

Pada gambar diagram di atas dapat di lihat bantuan yang diberikan Tiongkok ke kawasan Afrika sebanyak 45,7%, selanjutnya ke kawasan Asia sebanyak 32,8%, Amerika latin dan Karibia sebanyak 12,7%, Oceania 4,0%, dan Eropa sebanyak 0,3%. Hal tersebut menandakan bahwa bantuan Tiongkok lebih besar ke kawasan Afrika di bandingkan dengan kawasan lainnya.

Tabel 1. Fokus Bantuan Luar Negeri Tiongkok

Tahun	Fokus Bantuan Luar Negeri Tiongkok
1950-1970	Berfokus pada bantuan kemanusiaan. Dan bergabung dengan lembaga internasional seperti UNDP dan World Bank.
1971-1980	Berfokus pada <i>ideologi promotion</i> digunakan untuk perluasan identitas secara simbolik dengan kata lain sesama negara berkembang harus saling membantu.
1981-1990	Berfokus pada kontruksi ekonomi, memperkenalkan negara yang berbasis teknologi dan modal pembangunan domestik.
1991-2004	Berfokus pada mengamankan pertumbuhan ekonomi di tengah terjadinya penurunan suku bunga domestik. Menggunakan dua pendekatan dalam memberikan bantuan luar negeri seperti pinjaman lunak dan pendaan pembangunan proyek.
2005-sekarang	Berfokus terhadap bantuan luar negeri yang saling menguntungkan dan semakin mendasar menjadi bantuan teknis serta perilaku mencari keuntungan. Kebijakan bantuan luar negeri juga tidak lagi didasarkan pada ideologi namun berbasis pada ekonomi.

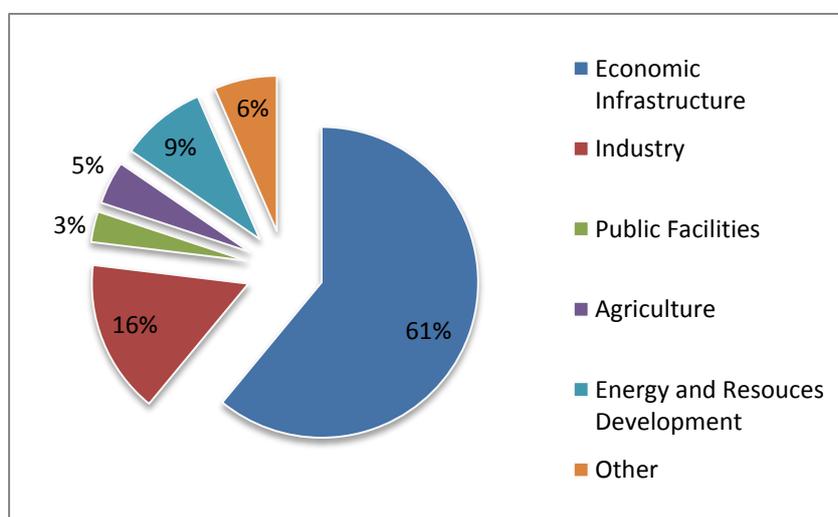
Perkembangan bantuan luar negeri seperti yang telah dipaparkan di tabel di atas memiliki fokus yang berbeda di setiap tahunnya. Bantuan luar negeri

yang diberikan Tiongkok kini beralih yang sebelumnya berfokus pada ideologi saja kini berfokus pada ekonomi. Tiongkok memiliki prinsip dalam kebijakan bantuan luar negeri yaitu (*China Foreign Aid*, 2011: 4):

- Tanpa henti memberikan bantuan terhadap negara penerima untuk membangun kapasitas pembangunan diri mereka. Pembangunan suatu negara sangat bergantung pada kekuatan negara itu sendiri. Dalam memberikan bantuan luar negeri Tiongkok melakukan yang terbaik seperti halnya menumbuhkan kekuatan negara dan kekuatan teknis, membangun infrastruktur, mengembangkan serta menggunakan sumber daya domestik, sehingga siap untuk pengembangan masa depan.
- Tidak adanya campur tangan politik domestik. Tiongkok sangat menghormati hak negara untuk memilih model pembangunan yang akan digunakan. Tiongkok tidak pernah menggunakan bantuan asing sebagai sarana untuk campur tangan dalam urusan internal negara penerima dan mencari hak politik untuk kepentingan sendiri.
- Saling menguntungkan dalam pembangunan. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh Tiongkok berfokus pada bantuan yang saling menguntungkan dan mengakomodasi kepentingan negara penerima.
- Tiongkok memberikan bantuan luar negeri sesuai dengan kemampuan kondisi nasionalnya. Tiongkok juga memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan negara penerima bantuan.
- Tiongkok menyesuaikan bantuan luar negerinya dengan pengembangan secara domestik maupun internasional. Membuat inovasi dalam

memberikan bantuan luar negeri untuk terus meningkatkan bantuan luar negerinya.

Bantuan luar negeri Tiongkok di bagi menjadi tiga jenis yaitu hibah, pinjaman tanpa bunga dan kerjasama teknis (China Foreign Aid, 2011: 5). Hibah digunakan untuk membantu negara penerima dalam membangun rumah sakit, sekolah dan proyek untuk penggalian sumur atau pasokan air serta pembangunan untuk kesejahteraan sosial hibah juga digunakan dalam proyek kerjasama pengembangan sumber daya manusia, kerjasama teknis, bantuan dalam bentuk kemanusiaan. Kerjasama teknis merupakan bantuan yang diberikan berupa tenaga ahli, pelatihan, dan peralatan. Bantuan teknik ini dimungkinkannya ahli teknologi yaitu dengan mengisi kekosongan dalam bidang tertentu dan sekaligus memindahkan keahlian para tenaga ahli internasional kepada tenaga kerja dalam negeri.



Sumber: *China White Paper 2011*

Gambar 5. Distribusi Pinjaman Tiongkok

Pinjaman lunak Tiongkok terbanyak diberikan untuk membantu pembangunan *economic infrastructure* sebanyak 61%, *industri* 16%, *public facilities* 3%, *agriculture* 5%, *energy and resources development* 9%, *other* 7%.

Tingkat bunga pinjaman lunak Tiongkok antara 2% dan 3% serta periode pembayaran 15 hingga 20 tahun. Dari pinjaman China, 61% digunakan untuk membantu negara berkembang untuk membangun transportasi, komunikasi dan infrastruktur listrik, dan 8,9% digunakan untuk mendukung pengembangan energi dan sumber daya seperti minyak dan mineral (*China Foreign Aid*, 2011: 6).

Jenis bantuan yang diberikan oleh Tiongkok adalah jenis bantuan yang saling menguntungkan. Hal tersebut mengisyaratkan Tiongkok dapat memfokuskan pada pembangunan proyek-proyek yang dapat menciptakan pendapatan Tiongkok dan negara penerima bantuan.

4.3 Gambaran Umum Sudan

Sudan merupakan negara yang terletak dibagian Afrika Utara dan menjadi negara terluas di Afrika dengan luas negara mencapai 2.505.810 km². Sudan merdeka dari jajahan Mesir dan Inggris pada tahun 1954. Setelah merdeka, terjadi kembali konflik di Sudan dalam dua periode yaitu pada tahun 1955-1972 dan pada tahun 1983-2004. Konflik ini dinamakan perang saudara, konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan latarbelakang ras dan agama antara masyarakat di wilayah Utara (*Government of Sudan*) dan masyarakat di wilayah Selatan (*Sudan People Liberty Movement*). Selain itu, konflik tersebut juga dilatar belakangi oleh kesenjangan sosial dan ekonomi serta perbedaan perlakuan antara pemerintah terhadap penduduk mayoritas kristiani wilayah selatan dan penduduk muslim-Arab dibagian utara. Akibat perbedaan dan agama tersebut terjadi pertikaian dan ketegangan yang menjadikan Sudan selama beberapa waktu terakhir dilanda konflik berkepanjangan. Konflik yang

terjadi di Sudan sempat terhenti karena adanya perjanjian Addis Ababa yang dinegosiasikan oleh Gos (*Government of Sudan*) dan SPLM (*Sudan People Liberty Movement*) (Douglas, 2011: 39). Perjanjian tersebut menghasilkan daerah otonomi khusus di bagian Sudan Selatan.

Konflik Sudan kembali memanas pada tahun 1983 sampai dengan 2004 dikarenakan penduduk di wilayah Selatan ingin meningkatkan pengaruh politiknya di wilayah Utara dan menuntut kemerdekaan. Selain itu Selatan juga menuntut perlakuan yang sama dari pemerintah dan pembagian sumber daya yang adil. Untuk memberhentikan konflik ini Uni Afrika atas permintaan SPLM menjadi mediator untuk merundingkan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan ke Sudan. Sudan Utara dan Sudan Selatan menemukan kesepakatan dengan adanya referendum pemisahan diri Sudan selatan yang di sebut dengan (*Comprehensive Peace Agreement*) yang di tandatangi oleh National Congress Party dan SPLM untuk menghentikan perang yang terjadi pada sejak tahun 1983.

Referendum pemisahan diri Sudan bagian selatan di atur oleh Southern Sudan Referendum Commission yang merupakan lembaga independen yang berbasis di Khartoum. CPA memiliki jangka waktu enam tahun dari 9 juli 2005 yang digunakan untuk menentukan apakah Sudan Selatan tetap masuk dalam negara Sudan atau memisahkan diri dari negara Sudan. Referendum dinyatakan berhasil apabila 60% voter memilih untuk merdeka (*The Carter Center*, 2011: 1). Hasil dari referendum diumumkan secara resmi pada 7 Februari 2011 dengan hasil 97,58% dari 3.947.676 voter menginginkan Sudan bagian selatan merdeka dari Sudan (*European Union Collection*, 2011 :3)

Sudan Selatan resmi menjadi negara baru pada 9 Juli 2011 dengan nama resmi Republic of South Sudan, tepat 6 tahun setelah berlakunya CPA.

4.3.1 Sudan Utara

Pasca kemerdekaan Sudan utara kini tetap di sebut sebagai negara Sudan. Penduduk Sudan dibagi berdasarkan etnis, suku dan aktivitas ekonomi. Total populasi yang ada di Sudan sebesar 36.163.778 pada tahun 2013. Laju pertumbuhan penduduk di Sudan sebesar 2,4% yang mana dalam hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Sudan dalam hal penyediaan, percepatan pertumbuhan ekonomi serta kelestarian lingkungan, menajemen sumber daya dan kesetaraan sosial.

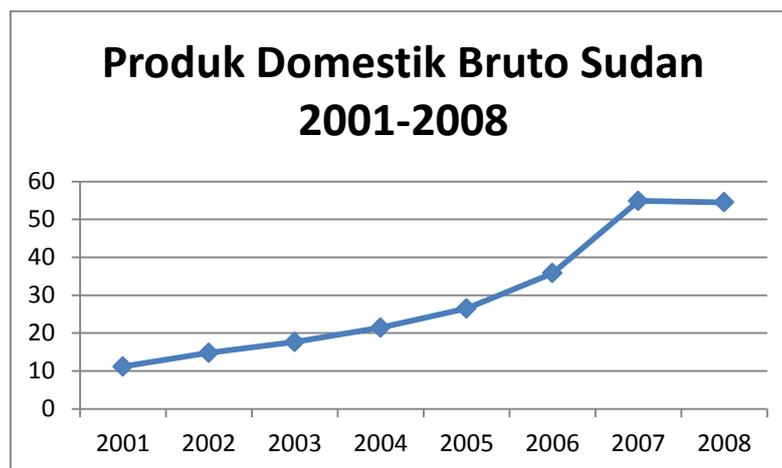


Gambar 6. Peta Wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan

Sudan telah mengalami ketidakstabilan politik dalam kurun waktu yang lama. Sudan juga telah melakukan penandatanganan CPA yang sekaligus mengakhiri perang sipil yang terjadi antara Sudan dan Sudan selatan. Meskipun telah mengakhiri perang sipil, masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan perbatasan di wilayah Abyei, biaya pemrosesan dan ekspor minyak

serta hutang-hutang negara. Permasalahan ini menyebabkan adanya ketidak stabilan dan adanya ketegangan lintas batas.

Kondisi ekonomi Sudan juga memprihatinkan. Eksploitasi minyak yang di alami Sudan sejak tahun 1999 menyebabkan perubahan besar dalam sturktur ekonomi Sudan. Struktur ekonomi sudan pada awalnya bergantung pada pertanian dan ekspor, namun saat ini Sudan bergantung pada sektor minyak (*Ministry of welfare and Social Security*, 2011: 3) Sektor minyak ini menyebabkan Sudan mengalami periode pertumbuhan ekonomi terkuat dan terlama. Tingkat bertumbuhan PDB nya sekitar 8% pada tahun 2001-2008.



Sumber: World Bank, 2001-2008

Gambar 7. Produk Domestik Bruto Sudan

Eksploitasi juga membuat adanya perubahan geopolitik Sudan dalam hal kebijakan luar negeri Sudan. Sektor minyak memungkin Sudan untuk menjalin kerjasama strategis dengan Negara-negara Asia Seperi India, Malaysia, dan yang terpenting adalah Tiongkok (*Ministri of Welfare and Social Security*, 2011: 3). Kerjasama yang di lakukan dengan Tiongkok berjalan dengan baik sehingga Sudan dapat menyelesaikan kemerosotan

ekonomi yang terjadi pada tahun 1989. Namun saat Sudan di pecah menjadi dua wilayah, menciptakan perubahan baru yang berdampak pada politik, ekonomi dan sosial Sudan. Kerugian keuangan yang terkait dengan pemisahan diri cukup besar dan telah mempengaruhi semua sektor ekonomi.

Penurunan ekonomi sudah dimulai sebelum Sudan terpecah menjadi dua, hal tersebut dikarenakan adanya krisis keuangan global yang semakin memperburuk pertumbuhan ekonomi Sudan. Pemisahan Sudan Selatan dari Sudan utara juga memakan biaya 75% dari produksi minyak, 50% dari anggaran pendapatan negara, 65% dari penerimaan devisa dan 80% dari total ekspor (*Ministry of Welfare and Social Security*, 2011: 6). Hasil dari pemisahan tersebut terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 lebih dari 5% dan tahun 2011 2,5%. Selain itu terjadi juga inflasi pada tahun 2010 sebanyak 13% sampai dengan tahun 2013 sebanyak 42% (*Ministry of Finance and National Economy*, 2012: 26-27).

Pemisahan Sudan menjadi dua wilayah membuat Sudan berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, menciptakan lapangan pekerjaan serta melakukan pembangunan keamanan jalan. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undangan dorongan investasi yang bertujuan untuk investor domestik dan asing agar dapat berinvestasi pada bidang pertanian, manufaktur, dan jasa serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan pekerjaan.

4.3.2 Sudan Selatan

Sudan Selatan merupakan negara pecahan dari Sudan yang memiliki luas wilayah 644.329 km² (*CIA Fact Book*, 2017: 1). Negara termuda di dunia ini yang berbentuk republik ini terletak di Afrika Timur dengan ibu kota Juba yang sekaligus berbatasan dengan Sudan. Jumlah Penduduk yang ada di Sudan Selatan sebesar 11.090.104 jiwa terdiri dari etnis Dinka, Nuer, Kakwa, Bari, Azande, Shilluk, Kuku, Murle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, dan Acholi (*CIA Fact Book*, 2017: 1). Sudan Selatan terbagi menjadi 10 pemerintahan administratif yaitu Central Equatoria, Eastern Equatoria, Jonglei, Lakes, Northern Bahr el Ghazal, Unity, Upper Nile, Warrap, Western Bahr el Ghazal, Western Equatoria. Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan Utara pada 09 Juli 2011, hal ini juga disahkan Sudan Selatan negara baru yang di daftarkan sebagai anggota 193 di PBB (*BBC South Sudan Profile*, 2014: 1).

Sebagai negara baru Sudan Selatan belum mampu untuk berdiri sendiri. Untuk memperbaiki kondisi negaranya, masih dibutuhkan bantuan dari negara lain maupun badan internasional untuk memulihkan kondisi negara pasca perang. Organisasi PBB yang bertugas untuk membantu adalah DDR. DDR bertujuan untuk membantu pemerintah Sudan dalam mengatasi buruknya tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan yang masih kurang, lapangan pekerjaan yang belum terjangkau oleh penduduk Sudan Selatan, hingga perbaikan nasib bagi perempuan dan anak-anak di Sudan Selatan.

Pasca kemerdekaan, pembangunan ekonomi di Sudan Selatan mulai dilakukan. Sebagai negara yang baru merdeka, Sudan Selatan membuka diri untuk para investor dan perusahaan asing untuk menanamkan modal di Sudan Selatan. Salah satu negara yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi di Sudan adalah Tiongkok. Tiongkok tetap memberikan bantuan terhadap kedua Sudan untuk mengembangkan ekonomi (Zhang, 2013: 7). Kerjasama Tiongkok dan Sudan Selatan berfokus terhadap ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. Perekonomian Sudan Selatan juga semakin memburuk dikarenakan masalah kemanusiaan seperti sulitnya akses untuk makanan. Pemerintah Sudan harus kembali membangun bangunan dan infrasturktur yang hancur.

Perkembangan ekonomi Sudan Selatan juga dapat dilihat dari hasil minyak bumi. Sudan Selatan adalah salah satu negara di kawasan Afrika dengan penghasil minyak terbesar. Namun, pipa minyak yang berada di perbatasan wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan menyebabkan pembagian minyak antar kedua Sudan. Salah satu dampak dari adanya pembagian minyak ini adalah penutupan produksi minyak oleh Sudan Utara. Akibat penutupan tersebut dan ekonomi yang belum stabil, terjadi inflasi besar di Sudan Selatan. Tercatat Sudan Selatan mengalami inflasi sebesar 39,4% pada tahun 2011 dan terus meningkat pada tahun 2012 (*International Bussiness Publication*, 2013: 69).

Sudan Selatan emiliki cadangan minyak yang sangat besar di perbatasannya dengan Sudan Utara. Namun mereka tidak memiliki infrastruktur yag memadai untuk pengelolaan minyak dan kemampuan

untuk memanen minyak di batasi oleh kegagalan infrastuktur dan konflik.

Ladang minyak selalu menjadi target utama dalam perang.

4.4 Hubungan Bantuan Luar Negeri Tiongkok Tiongkok dan Sudan 1950-2010

Hubungan Tiongkok dan Sudan di mulai saat Tiongkok memberikan bantuan luar negeri ke Sudan pada tahun 1950. Selain dalam hubungan bantuan luar negeri, hubungan Tiongkok dan Sudan juga dapat di lihat dari aspek ekonomi. Selama lebih dari satu dekade Tiongkok menjadi mitra dagang utama Sudan. Sudan membeli sekitar dua pertiga dari ekspor Sudan dan menyediakan seperlima impor globalnya. Tiongkok juga menjadi pengembang industri minyak di Sudan dan pembeli utama minyak di Sudan. Tiongkok banyak mengembangkan infrastruktur negara dan perusahaan. Selain itu, Tiongkok juga memiliki peran yang besar dalam sektor pertanian, pertambangan obat-obatan dan pendidikan. *CNPC (China National Petroleum Company)* telah menyimpulkan kesepakatan untuk pembagian produksi pemerintah Sudan yang bertujuan untuk mengembangkan blok minyak lepas pantai.

Bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan di mulai saat Sudan mengalami konflik pada tahun 1950. Selama konflik tersebut terjadi Sudan mengalami inflasi sebanyak 159,27% yang disebabkan pemerintah fokus terhadap konflik yang terjadi (*Index Mundi*, 2014: 1). Konflik tersebut juga mengundang banyaknya bantuan luar negeri yang masuk ke Sudan. Bantuan tersebut hadir dari organisasi internasional dan juga negara-negara di Dunia.

Bantuan luar negeri yang masuk ke Sudan tidak terlepas dari kekayaan sumber daya yang di miliki negara tersebut. Sudan memiliki lahan subur sekitar 80 juta hektar, kemudian lahan peternakan yang diperkirakan yang dapat menampung 132 juta ekor domba, kambing, sapi dan unta, lalu Suda juga memiliki padang rumput yang luasnya sekitar 24 juta hektar, kemudian daera hutan sekitar 64 juta hektar, juga memiliki sumber daya air yang cukup besar yang berasal dari sungai dengan jumlah tahunan 109 miliar meter kubik air, air tanah (sekitar 39 juta meter kubik) dan juga pertanian wijen, kapas, kacang tanah dan *gum arabic*. Selain pertanian dan sumber daya hewan, Sudan juga memiliki kekayaan mineral potensial yaitu minyak bumi, terbukti dengan 900 juta barel cadangan dengan prospek cadangan tambahan (*Technology Integration Division, 2012: 5*).

Bantuan yang hadir di Sudan berasal dari Amerika Serikat, Uni Eropa (Belanda, Italia, Jerman, Inggris), Arab Saudi ,Kuwait, Tiongkok, *World Bank, International Monetary Fund (IMF)*, dan *United Nation*. Namun mengingat banyaknya konflik yang terjadi di Sudan juga berpengaruh terhadap bantuan luar negeri untuk Sudan. Bantuan luar negeri yang diberikan kepada Sudan mulai menurun pada tahun 1990 terutama bantuan dari negara-negara Barat. Hal tersebut membuat Tiongkok menjadi negara pendonor utama di Sudan.

Tiongkok meningkatkan bantuan luar negerinya pada proyek pembangunan infrastruktur yang mana bantuan tersebut diberikan menggunakan dua jenis bantuan seperti *loan* dan *grant*.

Tabel 2. Distribusi Bantuan Pinjaman dan Hibah Tiongkok ke Sudan

Bentuk bantuan	2008-2010	2006-2008	2004-2006	2002-2004	1990-2002	1970-1990	1950-1970
% Hibah Tiongkok	1 %	11%	0,1%	20%	0%	1%	9%
% Pinjaman Tiongkok	99%	89%	99,1%	80%	100%	99%	91%
% Total pinjaman dan hibah Tiongkok	73%	24%	76%	7%	8%	7%	17%
% total hibah Tiongkok	0%	14%	36%	54%	0%	0%	100%
% Total pinjaman Tiongkok	74%	26%	76%	6%	9%	7%	16%

Sumber: *Central Bank of Sudan (External Debt Unit) and Ministry of Finance and National Economy*

Pada tabel di atas jumlah pinjaman dan hibah yang diterima oleh Sudan tertinggi pada tahun 2008-2010. Jumlah tersebut terdiri dari 1% hibah dan 99% pinjaman. Pola yang sama juga terjadi pada tahun 1970-1990 1% hibah dan 99% pinjaman. Selama periode ini bantuan hibah dan pinjaman yang diterima oleh Sudan mengalami ketidak konsistenan. Dapat di lihat pada tahun 1950-2004 total pinjaman Tiongkok menurun. Namun setelah 2004 meningkat pesat pada tahun 2005-2010.

Jika diperhatikan distribusi pinjaman dan hibah Tiongkok ke Sudan lebih menonjol pada bentuk bantuan pinjaman. Dengan demikian beban utang Sudan meningkat. Bantuan pinjaman dan hibah yang diberikan Tiongkok membuat berhasilnya pembangunan infrastruktur yang ada di Sudan. Pembangunan infrastruktur juga di dukung dengan adanya perjanjian *Economic, Trade, and Technical Cooperation* (Nour, 2007: 4). Perjanjian ini menghasilkan proyek-proyek bantuan Tiongkok untuk pembangunan Sudan seperti, pembangunan jembatan di Sungai Nil Putih, pembangunan jalan raya,

pendirian Pusat Informasi Minyak, proyek irigasi, rehabilitasi dan meningkatkan kapasitas *Sudan Airways* melalui pinjaman sebesar 180 juta dollar Amerika pada tahun 1996, pembentukan *Gari Power Station* dengan kapasitas 210 kw, pembuatan Sel Surya dengan Departemen Energi pada tahun 1997. Berbeda dengan bantuan luar negeri yang diberikan oleh Barat, Tiongkok memberikan bantuan dengan pinjaman dana dengan bebas bunga untuk pembangunan infrastruktur sebanyak \$1,1 milyar pada tahun 2010 (Kabbashi, 2010: 15). Berikut adalah total bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan:

Tabel 3. Data Jumlah Bantuan Luar Negeri Tiongkok 1950-2005

Tahun	Total bantuan yang diberikan	Pengeluaran keuangan	Total GNP
1950-1973	326.77	9924.11	32885.70
1974-1990	296.69	27242.42	129022.60
1991-2005	584.48	209453.77	1209778.4

Sumber: data on the period of 1950-1992 is cited from the PHD “the Research on the Official Development Aid”

Dapat dilihat pada tabel di atas bantuan luar negeri Tiongkok mengalami peningkatan setiap tahunnya sekalipun setiap periode memiliki fokus yang berbeda di setiap periode. Peningkatan bantuan luar negeri Tiongkok ini tetap dilakukan dengan tujuan mendapatkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Peningkatan bantuan Tiongkok juga meningkat pada bantuan pembangunan infrastruktur minyak. Hal tersebut dikarenakan banyaknya sumber daya alam seperti minyak yang di miliki oleh Sudan. Tiongkok melihat adanya potensi minyak yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi

di Sudan dengan adanya pengolahan minyak yang baik. Tiongkok juga memberikan bantuan infrastruktur penyulingan minyak.

Bantuan-bantuan infrastruktur yang diberikan oleh Tiongkok menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik di Sudan dengan ditandainya peningkatan GDP mencapai 5,9% pada tahun 2005 dan juga inflasi yang menurun drastis dari 159,27% menjadi 32,56% 1996 hingga 1,93% tahun 2005 (Index mundi, 2014: 1). Bantuan luar negeri Tiongkok di anggap sebagai bantuan luar negeri yang cepat dan mudah selain itu juga bantuan luar negeri Tiongkok di anggap sebagai bantuan yang dapat meningkatkan ekonomi Sudan.

VI. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang berjudul “ Motif Bantuan Luar Negeri Tiongkok ke Sudan Pasca Merdeka 2011-2014” berikut adalah kesimpulannya:

1. Berdasarkan bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan pasca merdeka tahun 2011-2014, bantuan Tiongkok mengalami naik dan turun setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi domestik dari negara penerima bantuan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk hibah, pinjaman dan kerjasama teknis. Berdasarkan data bantuan yang diberikan Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan, bantuan yang diberikan memunculkan motif kemanusiaan, politik dan ekonomi. Motif kemanusiaan muncul berdasarkan data bantuan yang bersifat kemanusiaan seperti untuk mengatasi kelaparan kesehatan dan pendidikan. Motif politik berdasarkan indikator *good image* dan *great influence*. Motif ekonomi berdasarkan data bantuan yang digunakan untuk membuka kerjasama dan mengamankan suplai energi.

2. Pemberian bantuan luar negeri Tiongkok ke Sudan dan Sudan Selatan memiliki motif yang sama yaitu ekonomi. Munculnya motif ekonomi dapat dilihat dari tiga indikator yaitu memperluas pasar, membuka kerjasama baru dan mengamankan suplai energi. Meski memiliki motif ekonomi, bantuan luar negeri Tiongkok menguntungkan dua belah pihak yaitu Tiongkok sebagai pendonor dan Sudan dan Sudan Selatan sebagai negara penerima.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tiongkok sebagai negara pemberi bantuan sebaiknya meningkatkan bantuan dalam bentuk kerjasama teknis. Bantuan kerjasama teknis tidak hanya pada pelatihan sektor kesehatan saja. Melainkan ada pada sektor pendidikan, teknologi dan lainnya. Pemerataan akan kerjasama teknis ini dapat mengembangkan potensi diri dari masyarakat Sudan dan Sudan Selatan.
2. Sudan dan Sudan Selatan sebaiknya melakukan pengajuan bantuan secara merata. Agar sektor kemanusiaan dan pembangunan fasilitas publik juga mendapatkan bantuan yang merata.
3. Terakhir saran yang diberikan penulis untuk peneliti selanjutnya karena keterbatasan waktu dan akses yang dimiliki

oleh penulis untuk lebih menggali penelitian ini menjadi penelitian yang lebih maksimal dan dapat digunakan untuk kepentingan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alan Rix.1993. *Japan Foreign Aid Policy Reform and Aid Leadership*. Routledge.
London and New York

Anan, Abdul Hadi. 2006. *Penyelesaian Masalah Sudan Dan Krisis Darfur*.
Jakarta.

Asra Virgianita.2014.*Perkembangan Diskursus dan Implementasi Bantuan Luar
Negeri dalam Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Sempu: Yogyakarta

Cheng, Chu-yuan. 1971. *The economy of Communist China 1949-1969 : with a
bibliography of selected materials on Chinese economic development*. Ann
Arbor : University of Michigan, Center for Chinese Studies

Dr. Anak Agung Banyu Perwita & Dr.Yanyan Mochammad Yani. 2011.
Pengantar ilmu Hubungan Internasional. PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Degnbol-Matinussen and Engberg-Pedersen.2003. *Aid Understanding
International Development Cooperation*. London: Zed

Husaini Usman, 2008. *Metode Penelitian Sosial*

Hou Xiong.2017.*China's Foreign Aid and Multilateral Development
Organizations*, Social Sciences Academic Press and Springer Science
Business Media, Singapore

- Lancaster, Caol. 2007. "Aid's Puspose: a Brief history, dalam Foreign Aid: *Diplomacy, Development, Domestic and Politics*, Chicago: The University of Chicago Press
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California. Sage Publication
- Norman K. Denzin dan Yvona S. Lincoln. 2011. The *SAGE Handbook Of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA. SAGE Publications, Inc
- Pan Yaling. 2015 *World Century Publishing Corporation and Shanghai Institutes for International Studies China Quarterly of International Strategic Studies*, Vol. 1, No. 2, 283
- Picard, Louis A. *Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half-Century*. New York: M.E. Sharpe, Inc., 2008
- Riddell, Roger C. 2008. *Does Foreign Aid Work?*. Oxford: Oxford University Press
- Völgyi K. (2011). *Kína regionális kapcsolattrendszerei az ázsiai és afrikai relációkban. In: Kína és a Világ* (ed.: Inotai András - Juhász Ottó), MTA VKI-MeH Stratégiai Kutatások, Budapest, Hungary

Jurnal, Arikel dan Laporan:

- Anton Bowono, " sosialisme pasar: sebuah reformasi sistem ekonomi di china, UIN Sunan kali jaga, jogyakarta : 2008

China's Foreign Aid Information Office of the State Council, People's Republic of China: Beijing, April 2011

Douglas Hamilton Johnson. *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Peace Or Truce*. Kampala: Fountain Publisher, 2011

Dr Zhang Chun. "China's relations with two Sudans: From one country, two systems to two countries, one system". Dalam Safeworld Report. *Oil, security and community engagement*. 2013

Guljinder Kaur Randhawa, *Foreign Aid in Economic Development*, International Journal of Computing & Business Research

Haitam Abdulaziz Almosharaf, Fung Ding tian. "The Causes of Sudan's Recent economics Decline". Journal of Economics and Finance (IQR) Vol 2, Issu 4.2014

Hans Morgenthau. A Political Theory of Foreign Aid. *The American Political Science Review*, Vol. 56, No. 2, Jun., 1962

International Business Publication. "Sudan South Doing Business, Investing And International Assistance in South Sudan Guide". *Strategic and Prantical Information*, Vol 1, 2013

Kabbashi M. Suliman. *An assessment of the Impact of China's Investments in Sudan*. University of Khartoum, 2010

Kristian Kjøllestad. "Foreign Aid Strategies: China Taking Over?". Vol. 6, No. 10; October 2010

Manisha raj. "The impact of global financial crisis in Sudan". SSRN Electronic journal vol 2. Januari 2012

Marina Ottaway dan Mai El-Sadany. *Sudan: From Conflict to Conflict*. (Middle East: The Carnegie Papers, 2012)

Ministry of Welfare and Social Security National Population Council "Sudan National Voluntary Report"

Ministry of Finance and National Economy, "The real sector: current position, challenges and future prospects", a paper presented by the Ministry of Finance at the Economic Forum, November 2012. Khartoum

Nour Eldin A. Maglad. *Scoping Study on Chinese Relation with Sudan*, Tanzania: 2007)

Nowak, Wioletta. *China's Development Aid Strategies*. Chinese Business Review, Vol 14, No. 4, April 2015

Technology Integration Division. *Sudan In Perspective: An Orientation Guide*, (Defense

Language Institute Foreign Language Center, 2012

Report of Chinese aid data "AidData China to Sudan and South Sudan" 2011-2014

Report from Anna Louise Strachan, Humanitarian result Indicator, 2017

Sara Lengauer, China's foreign aid policy: Motive and method, The Bulletin of the Centre for East-West Cultural and Economic Studies, Vol. 9, Issue 2, September 2011

Sudan National Voluntary Report, Ministry of Welfare and Social Security National Population Council

Severibe Autesserre, United State “Humanitarian Diplomacy” in South Sudan,
Journal of International Relation Vol 8, Issue 2, 2002

Situs berita/internet:

Bank of China Group www.tdctrade.com/econforum/boc/boc021001.htm

BBC.South Sudan Profile.<http://www.bbc.com/news/worldafrica> China Daily,
China depending more on imported oil, 20 January 2010.

Diaksesmelaluihttp://www.chinadaily.com.cn/china/2010-01/20/content_9346446.htm

ChinaExpor,<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2013/TradeFlow/Export/Partner/SSD/Product/all-groups>

ChinaCooperation,https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1525562.shtml

China and South Sudan Relation, <http://ss.china-embassy.org/eng/>

Central Intelligence Agency,<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>

Energi International Agency, <https://www.iea.org/statistics/>

Index Mundi, Sudan-Inflation: Inflation, GDP deflator (annual %). Diakses melalui <http://www.indexmundi.com/facts/sudan/inflation>

Humanitarian Aid <http://ss.chineseembassy.org/eng/sbjw/t1501334.htm>

John C King, *Qualitative Research In Method In International Affairs For Master Students*, https://www.american.edu/sis/crs/upload/2011SP-SIS-680-001_King.pdf

One World Nation, <https://www.nationsonline.org/oneworld/china.htm>

The data are derived from Ministry of Commerce (MOFCOM) of the People's Republic of China, based on the summary of China Daily:

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/201112/08/content_14232230.htm

Sudan get loan, <https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudan-to-get-88-million-in-loans-and-grants-from-china>

US Department of State . 2012. People's Republic of China. Diakses melalui <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/18902.htm>

WHO "Disater in South Sudan" <http://www.who.int/emergencies/diseases/en/>

WorldBank,<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/SUDANEXTN/0,,menuPK:375432~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:375422,00.html>